



# SUMBER DAYA MANUSIA PAUD DAN NONFORMAL



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2016



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



# ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
JAKARTA, DESEMBER 2016

## KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia. Kemdikbud, Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tahun 2016/Disusun oleh: Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan.  
– Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016  
x, 59 hal, bbl, ilus, 23 cm

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. DATA                  | 5. Paket A setara SD  |
| 2. Pendidikan Keaksaraan | 6. Paket B setara SMP |
| 3. PAUD                  | 7. Paket C setara SMA |
| 4. TK                    | 8. Kursus             |
| I. Judul                 |                       |

Tim Penyusun Buku

Pengarah:  
Bastari  
Siti Sofiah

Penulis:  
Fitri Sumairawati

Penyunting:  
Sudarwati

Desain Cover:  
Fitri Sumairawati

© PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2016

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku "Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tahun 2016" ini bertujuan untuk melakukan kajian data pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal (PNF) khusus tentang sumber daya manusia (SDM) pada program-program PAUD dan PNF. SDM yang dimaksud terdiri dari pendidik dan pengelola. Program PAUD dan PNF yang dimaksud terdiri dari pendidikan keaksaraan, PAUD, taman kanak-kanak (TK), pendidikan kesetaraan yang terdiri dari paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA serta kursus.

Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan adalah Statistik PAUD dan Statistik PNF yang dihasilkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dan Data Pokok Pendidikan Nonformal (dapodik nonformal) yang diolah kembali. Pengumpulan data dilakukan menggunakan item data yang diperlukan dalam melakukan analisis SDM PAUD dan PNF. Item data tersebut terdiri dari tiga jenis data, yaitu peserta didik, pendidik, dan pengelola. Rincian untuk pendidik ada empat jenis, yaitu menurut ijazah, menurut jenis kelamin, menurut pekerjaan utama/status kepegawaian, dan menurut pelatihan yang diikuti. Rincian untuk pengelola ada dua, yaitu menurut ijazah, dan menurut jenis kelamin. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik tabulasi dalam tabel untuk memudahkan dalam melakukan interpretasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil dan bahasan terdiri dari empat hal, yaitu 1) potensi SDM PAUD dan PNF, 2) kebutuhan, kekurangan/kelebihan SDM PAUD dan PNF, 3) indikator SDM PAUD dan PNF, dan 4) kinerja SDM PAUD dan PNF berdasarkan indikator pendidikan. Untuk melakukan analisis tersebut maka sebagai sumber data yang digunakan adalah Statistik PAUD dan Statistik PNF Tahun 2013 yang tersedia di PDSPK serta dapodik nonformal.

Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi SDM PAUD dan PNF cukup besar, dengan peserta didik sebesar 15,9 juta ditangani oleh pendidik sebesar 642,3 ribu orang, dan pengelola sebesar 241,3 ribu orang. Berdasarkan data SDM PAUD dan PNF dan standar yang ditentukan maka dapat dihitung kebutuhan pendidik PAUD dan PNF untuk selanjutnya dihitung kekurangan/kelebihan pendidik PAUD dan PNF. Kebutuhan pendidik PAUD dan PNF sebesar 629.193 orang dengan rincian terbesar pada PAUD sebesar 256.142 orang dan terkecil pada Paket A setara SD sebesar 351 orang. Secara keseluruhan, pada PAUD dan PNF terdapat kelebihan pendidik sebesar 13.128 orang.

Berdasarkan indikator maka dapat dihitung delapan jenis indikator yang terkait dengan SDM. Bila dilihat dari indikator yang digunakan dan dengan menggunakan kategori pencapaian termasuk paripurna, utama, madya, pratama, dan kurang maka dua indikator, yaitu persentase pendidik perempuan dan persentase pengelola perempuan menunjukkan kinerja kategori madya, rasio peserta didik per pendidik termasuk kategori pratama, sedangkan indikator lainnya seperti persentase

pendidik memiliki ijazah S1 dan lebih tinggi, persentase pendidik berasal dari guru, persentase pendidik yang telah mendapatkan pelatihan, pengelola memiliki ijazah S1 dan lebih tinggi termasuk kategori pratama.

Kinerja tujuh program PAUD dan PNF menunjukkan bahwa terdapat lima program, yaitu pendidikan keaksaraan termasuk kategori madya, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA dan kursus termasuk kategori utama sedangkan PAUD dan TK termasuk kategori kurang. Dengan melihat kinerja program PAUD dan PNF maka disarankan agar pendidik dan pengelola PAUD dan TK ditingkatkan kualifikasinya agar mencapai S1. Selain itu, khusus PAUD supaya pendidiknya mendapatkan pelatihan tentang PAUD. Bila semua saran itu dapat dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan mutu program PAUD dan PNF.

## KATA PENGANTAR

Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Tahun 2016 ini merupakan hasil kajian tentang data dan informasi pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal (PNF) khususnya mengenai SDM. PAUD yang dimaksud terdiri dari PAUD dan TK, sedangkan PNF yang dimaksud adalah pendidikan keaksaraan, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, dan kursus.

Data dan informasi yang dianalisis bersumber pada Statistik PAUD dan Statistik PNF tahun 2015 yang dipublikasikan oleh PDSPK dan dapodik nonformal sebagai pelengkap. Statistik yang dimaksud adalah Statistik PAUD yang terdiri dari PAUD dan TK, Statistik PNF yang terdiri dari pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan kursus.

Analisis SDM PAUD dan PNF dilakukan dengan melihat potensi SDM PAUD dan PNF, kemudian dilakukan analisis dengan dua cara, yaitu berdasarkan data PAUD dan PNF dan berdasarkan indikator SDM PAUD dan PNF. Dengan menggunakan data PAUD dan PNF serta standar tertentu maka dihitung kebutuhan pendidik, dan berdasarkan kebutuhan dapat dihitung kekurangan/kelebihan pendidik. Selain itu dengan menggunakan rasio peserta didik per pendidik dapat diketahui secara singkat kekurangan/kelebihan pendidik PAUD dan PNF. Berdasarkan tujuh indikator pendidikan lainnya dapat diketahui masalah SDM PAUD dan PNF, yaitu empat indikator pendidik dan tiga indikator pengelola. Indikator pendidik adalah persentase pendidik S1 dan lebih tinggi, persentase pendidik perempuan, persentase pendidik berasal dari guru atau tetap, dan persentase pendidik yang mendapat pelatihan. Indikator pengelola adalah persentase pengelola S1 dan lebih tinggi, persentase pengelola perempuan, dan persentase pengelola yang mendapat pelatihan. Dengan menggunakan ke-8 indikator pendidikan, yaitu rasio peserta didik per pendidik, persentase pendidik S1 dan lebih tinggi, persentase pendidik perempuan, persentase pendidik berasal dari guru atau tetap, persentase pendidik yang mendapat pelatihan, persentase pengelola S1 ke atas, persentase pengelola perempuan, dan persentase pengelola yang mendapat pelatihan maka dapat dihitung kinerja SDM PAUD dan PNF.

Hasil analisis menggunakan kategori kinerja menunjukkan bahwa dari tujuh program PAUD dan PNF yang dianalisis, terdapat lima program, yaitu pendidikan keaksaraan, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA dan kursus termasuk kategori pratama, sedangkan PAUD dan TK termasuk kategori kurang. Walaupun demikian, kinerja terbaik dari program PAUD dan PNF adalah paket C setara SMA dengan nilai sebesar 68,98 termasuk kategori pratama dan terburuk adalah program PAUD dengan nilai sebesar 48,46 termasuk kategori kurang. Dengan demikian, kinerja SDM PAUD dan PNF dari tujuh program sebesar 61,95 termasuk kategori pratama.

PDSPK mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak sehingga buku ini dapat disusun. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2016

Kepala,

Dr. Bastari  
NIP 19660730 1990011001

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I :     PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	2
C. Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Manfaat	3
BAB II:     KAJIAN PUSTAKA	4
A. Sumber Daya Manusia	4
B. Analisis	4
C. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5
D. Standar Indikator dan Konversi Nilai	6
E. Kinerja	7
BAB III:    METODOLOGI	9
A. Metode	9
B. Analisis SDM PAUD dan PNF	10
1. Analisis Berdasarkan Data	10
2. Analisis Berdasarkan Indikator Pendidikan	11
C. Kinerja SDM PAUD dan PNF Berdasarkan Indikator Pendidikan	15
BAB IV:     HASIL DAN BAHASAN	17
A. Potensi SDM PAUD dan PNF	17
B. Kebutuhan dan Kekurangan/Kelebihan SDM PAUD dan PNF	21
C. Indikator SDM PAUD dan PNF	27
D. Kinerja SDM PAUD dan PNF	37
BAB V:     PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Saran	57
PUSTAKA ACUAN	59



## DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB III	
Tabel 3.1 : Indikator SDM PAUD dan PNF	12
Tabel 3.2 : Standar Menentukan Indikator SDM PAUD dan PNF	15
Tabel 3.3 : Jenis Kinerja SDM PAUD dan PNF	16
BAB IV	
Tabel 4.1 : Variabel Data SDM PAUD dan PNF	17
Tabel 4.2 : Data SDM PAUD dan PNF menurut Program	18
Tabel 4.3 : Data SDM PAUD dan PNF menurut Program Tiap Provinsi	19
Tabel 4.3 : Lanjutan Data SDM PAUD dan PNF Menurut Program Tiap Provinsi	21
Tabel 4.4 : Kebutuhan Pendidik PAUD dan PNF Menurut Program Tiap Provinsi	22
Tabel 4.5 : Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF Menurut Program Tiap Provinsi	23
Tabel 4.6 : Rasio Peserta Didik per Pendidik PAUD dan PNF Menurut Program Tiap Provinsi	24
Tabel 4.7 : Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Rasio Peserta Didik per Pendidik Menurut Program Tiap Provinsi	26
Tabel 4.8 : Indikator SDM PAUD dan PNF Menurut Program	28
Tabel 4.9 : Indikator SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi	
Tabel 4.10 : Indikator SDM PAUD Tiap Provinsi	30
Tabel 4.11 : Indikator SDM TK Tiap Provinsi	31
Tabel 4.12 : Indikator SDM Paket A Setara SD Tiap Provinsi	33
Tabel 4.13 : Indikator SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi	34
Tabel 4.14 : Indikator SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi	35
Tabel 4.15 : Indikator SDM Kursus Tiap Provinsi	36
Tabel 4.16 : Kinerja SDM PAUD dan PNF Menurut Program	37
Tabel 4.17 : Kinerja SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi	39
Tabel 4.18 : Kinerja SDM PAUD Tiap Provinsi	41
Tabel 4.19 : Kinerja SDM TK Tiap Provinsi	43
Tabel 4.20 : Kinerja SDM Paket A Setara SD Tiap Provinsi	45
Tabel 4.21 : Kinerja SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi	47
Tabel 4.22 : Kinerja SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi	49
Tabel 4.23 : Kinerja SDM Kursus Tiap Provinsi	51
Tabel 4.24 : Kinerja SDM Program PAUD dan PNF Tiap Provinsi	53

BAB V			
Tabel 5.1	:	Data SDM PAUD dan PNF Menurut Program	54
Tabel 5.2	:	Kebutuhan dan Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF menurut Program	54
Tabel 5.3	:	Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Rasio Peserta Didik per Pendidik	55
Tabel 5.4	:	Indikator SDM PAUD dan PNF Menurut Program	55
Tabel 5.5	:	Kinerja SDM PAUD dan PNF Menurut Program	56

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
<b>BAB IV</b>	
Grafik 4.1 : Data SDM PAUD dan PNF Menurut Program	18
Grafik 4.2 : Perbedaan Rasio Peserta Didik per Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Standar Menurut Program	27
Grafik 4.3 : Indikator Pendidik PAUD dan PNF Menurut Program	28
Grafik 4.4 : Indikator Pengelola PAUD dan PNF Menurut Program	28
Grafik 4.5 : Kinerja SDM PAUD dan PNF menurut Program	37
Grafik 4.6 : Kinerja SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi	40
Grafik 4.7 : Kinerja SDM PAUD Tiap Provinsi	42
Grafik 4.8 : Kinerja SDM TK Tiap Provinsi	44
Grafik 4.9 : Kinerja SDM Paket A Setara SD Tiap Provinsi	46
Grafik 4.10 : Kinerja SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi	48
Grafik 4.11 : Kinerja SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi	50
Grafik 4.12 : Kinerja SDM Kursus Tiap Provinsi	52
Grafik 4.13 : Kinerja SDM Program PAUD dan PNF Tiap Provinsi	53

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11, Tahun 2015 (Permendikbud 11/2015) maka terdapat tugas dan fungsi tentang pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan Permendikbud 11/2015, pendayagunaan data adalah kegiatan yang bersifat aktif dalam melakukan eksplorasi data. Untuk melakukan eksplorasi dituntut adanya kreativitas dan kepekaan yang tinggi dari para personilnya sehingga dapat selalu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan maupun masyarakat berkenaan dengan pengenalan arah dan permasalahan dunia pendidikan. Untuk dapat mendayagunakan data yang ada diperlukan kemampuan dalam melakukan analisis dan sintesis data maupun interpretasi data. Kemampuan tersebut harus dimiliki oleh semua personil di lingkungan unit kerja yang menangani pendataan. Analisis adalah kemampuan dalam mencari keterkaitan antarvariabel data pendidikan sehingga dapat tercipta informasi-informasi baru yang relevan dengan tujuan pembinaan, penyelenggaraan, dan program pembangunan pendidikan. Sintesis data adalah kemampuan dalam mencari keterkaitan antara variabel data pendidikan dengan data nonpendidikan.

Analisis SDM PAUD dan PNF ini dapat dilakukan karena adanya statistik PAUD dan PNF yang telah dipublikasikan setiap tahun sehingga dapat mendukung dilakukannya analisis SDM dalam rangka meningkatkan mutu statistik pendidikan dan khususnya PAUD dan PNF serta secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu program PAUD dan PNF. SDM PAUD dan PNF yang dimaksud adalah pendidik dan pengelola pada program PAUD dan PNF.

Selain itu, sampai saat sekarang belum adanya rincian analisis SDM PAUD dan PNF menggunakan indikator pendidikan. Bila digunakan indikator pendidikan, yaitu rasio peserta didik dan pendidik maka dapat diketahui kekurangan dan kelebihan SDM PAUD dan PNF. Bila digunakan 7 indikator pendidikan lainnya, yaitu persentase pendidik S1 dan lebih tinggi, persentase pendidik perempuan, persentase pendidik berasal dari guru atau tetap, persentase pendidik yang mendapat pelatihan, persentase pengelola S1 ke atas, persentase pengelola perempuan, dan persentase pengelola yang mendapat pelatihan maka dapat dilakukan analisis untuk melihat masalah atau mengetahui kinerja pendidikan khususnya SDM PAUD dan PNF. Untuk itu, pada tahun 2016 ini PDSPK, Kemendikbud melakukan analisis SDM yang

dikhususkan pada program PAUD dan PNF dengan menggunakan data terbaru dari statistik PAUD dan statistik PNF tahun 2016 yang dihasilkan dipublikasikan oleh PDSPK.

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi adanya beberapa permasalahan yang akan di bahas pada analisis ini:

1. Bagaimanakah potensi SDM PAUD dan PNF berdasarkan data pada setiap program pendidikan?
2. Bagaimanakah potensi SDM PAUD dan PNF berdasarkan indikator pendidikan pada setiap program pendidikan?
4. Bagaimanakah kinerja SDM PAUD dan PNF berdasarkan indikator pendidikan pada setiap program pendidikan?

## C. Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka terdapat empat tujuan dilakukannya kegiatan Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Tahun 2016, yaitu :

1. Tersusunnya analisis potensi SDM berdasarkan data yang terdiri dari kekurangan/ kelebihan SDM PAUD dan PNF pada tahun 2016.
2. Tersusunnya analisis potensi SDM berdasarkan indikator PAUD dan PNF pada tahun 2016.
3. Tersusunnya kinerja SDM PAUD dan PNF menggunakan indikator pendidikan pada tahun 2016.

## D. Ruang Lingkup

Untuk dapat melaksanakan kegiatan Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Tahun 2016 maka ruang lingkungnya dibatasi hanya pada data Statistik PAUD dan Statistik PNF yang tersedia pada tahun 2015 serta, jenis program pendidikan yang akan di publikasikann oleh PDSPK Kemendikbud. Analisis yang dilakukan terdiri dari dua jenis, yaitu berdasarkan data dan berdasarkan indikator pendidikan.

Penentuan ruang lingkup ini dianggap sangat diperlukan karena dengan melakukan analisis data yang ada pada Statistik PAUD dan Statistik PNF maka dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan terhadap statistik yang dihasilkan. Keuntungan lainnya adalah memacu PDSPK, Kemendikbud untuk mengumpulkan data lebih lanjut dan memperbaiki item data sehingga

memperkaya data dan informasi yang dimiliki oleh PDSPK, dan untuk Kemendikbud pada umumnya.

#### E. Manfaat

Dengan disusunnya buku ini diharapkan dapat digunakan oleh Kemendikbud, *stakeholder*, dan pemerhati pendidikan yang ingin mengetahui tentang data SDM PAUD DAN PNF serta analisisnya yang dapat digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang pendidikan khususnya yang terkait dengan SDM PAUD dan PNF.

Untuk Kemendikbud dengan tersedianya data SDM PAUD dan PNF dapat mengetahui SDM PAUD dan PNF khususnya di tiap program pendidikan, menghitung indikator SDM PAUD dan PNF yang dapat digunakan untuk menilai kualitas PAUD dan PNF, dan bagaimana kinerja SDM PAUD dan PNF tiap program pendidikan. Selain itu, dapat digunakan dalam rangka perencanaan pendidikan, penentuan kebijakan, dan pengambilan keputusan tentang PAUD dan PNF khususnya SDM PAUD dan PNF di tingkat nasional.

Bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan analisis yang sama sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan kekurangan/kelebihan SDM PAUD dan PNF serta dapat digunakan melihat kinerja SDM PAUD dan PNF tiap program pendidikan. Selain itu, dapat digunakan untuk penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait dengan SDM PAUD dan PNF di tingkat yang sesuai.

*Stakeholder* dapat memanfaatkan data SDM PAUD dan PNF untuk kebutuhan pengembangan SDM PAUD dan PNF dipandang dari rincian SDM lainnya. Pemerhati pendidikan dapat memanfaatkan data SDM PAUD dan PNF untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan SDM pendidikan atau penelitian lainnya yang terkait dengan SDM PAUD dan PNF.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk suatu proses produksi. (<http://kamus.bahasaindonesia.org/sumber-daya-manusia>).

Menurut wikipedia, SDM bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Oleh karena itu, muncullah istilah baru di luar SDM, yaitu *human capital*. Di sini SDM dilihat bukan sekedar sebagai aset utama melainkan juga aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan dan dikembangkan. Dengan demikian, SDM merupakan investasi bagi institusi atau organisasi. ([wikipedia.org/wiki/sumber\\_daya\\_manusia](http://wikipedia.org/wiki/sumber_daya_manusia)).

Menurut Sonny Sumarsono, SDM atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi sehingga SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja yang mempunyai kegiatan ekonomis sehingga kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat. Menurut Mary Parker Follett, manajemen SDM adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. (<http://humancapitaljournal.com/pengertian-sumber-daya-manusia/>).

Dalam kaitan dengan pendidikan maka SDM PAUD dan PNF adalah pendidik dan pengelola karena oleh merekalah program PAUD dan PNF dapat dikembangkan dan ditingkatkan mutunya.

### B. Analisis

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. (<http://kamus.bahasaindonesia.org/analisis>).

Berdasarkan Permendikbud Nomor 11, Tahun 2015, Pasal 813 bidang Pendayagunaan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Pasal 814 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813, Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyusunan statistik pendidikan dan kebudayaan;
- c. pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan;
- d. pemberian layanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; dan
- e. koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.

Berdasarkan pada 815 maka bidang Pendayagunaan dan Pelayanan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pendidikan Pendidikan yang mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan.
- b. Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Kebudayaan yang mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan statistik, pendayagunaan, dan pelayanan data dan statistik serta penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik kebudayaan. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Dengan demikian, analisis data yang dilaksanakan telah sesuai dengan tugas dan fungsi PDSPK yang memiliki tugas untuk melaksanakan pendayagunaan data statistik pendidikan dan kebudayaan pada umumnya dan PAUD dan PNF pada khususnya yang dipublikasikan setiap tahun.

### C. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, nonformal berarti tidak resmi atau bersifat di luar kegiatan resmi sekolah. Dengan demikian, pendidikan nonformal adalah pendidikan di luar jalur sekolah. (<http://kbbi.web.id/nonformal>).

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 butir 14, pendidikan anak usia dini (PAUD) didefinisikan sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak



sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini, yaitu tujuan utama dan penyerta. Tujuan utama adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Tujuan penyerta adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 ayat 1 adalah 0-6 tahun. (Depdiknas, 2003).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, bagian kelima, pasal 26 menyebutkan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Selain itu, pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Jenis pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (Depdiknas, 2003).

Menurut wikipedia, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil

program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

([https://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan\\_nonformal](https://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan_nonformal)).

Pendidikan nonformal terdiri dari enam program, yaitu pendidikan keaksaraan, PAUD dan TK, pendidikan kesetaraan yang terdiri dari paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA, pendidikan berkelanjutan, yang terdiri dari kursus, pendidikan kecakapan hidup (PKH), dan kelompok belajar usaha (KBU), pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan taman bacaan masyarakat (TBM). Namun, yang dapat dilakukan analisis hanya empat program, yaitu program pendidikan keaksaraan, PAUD dan TK, pendidikan kesetaraan yang terdiri dari paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA, dan kursus karena keempat program tersebut memiliki data pendidik dan pengelola yang cukup rinci.

#### D. Standar Indikator dan Konversi Nilai

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan atau sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai. (<http://kamus.bahasaindonesia.org/standar>). Konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. (<http://kamus.bahasaindonesia.org/konversi>).

Menurut wikipedia, standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen format yang menciptakan kriteria, metode, proses dan praktik rekayasa atau teknik yang seragam. Standar terdiri dari dua, yaitu standar primer dan standar sekunder. Standar primer biasanya berada dalam yurisdiksi suatu badan standarisasi nasional, sedangkan standar sekunder biasanya digunakan sebagai rujukan dalam suatu sistem metrologi. Selain itu, terdapat standar yang diterima umum dan bersifat dominan yang sering disebut standar *de facto*. ([wikipedia.org/wiki/standar](http://wikipedia.org/wiki/standar)).

Dengan demikian, standar indikator pendidikan sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian suatu indikator pendidikan khususnya indikator SDM PAUD dan PNF, sedangkan konversi nilai diperlukan untuk menjadikan indikator pendidikan SDM PAUD dan PNF dalam satu satuan yang sama.

#### E. Kinerja

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan (<http://kamus>

bahasaindonesia.org/kinerja). Menurut wikipedia, kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. (wikipedia.org/wiki/kinerja).

Dengan demikian, kinerja yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kondisi yang telah dicapai oleh pendidik dan pengelola khususnya pada pendidik dan pengelola PAUD dan PNF.

## BAB III METODOLOGI

### A. Metode

Dalam pelaksanaan kegiatan Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 2016 ini menggunakan metode dengan pendekatan studi dokumentasi atau kepustakaan baik yang ada di PDSPK maupun di lingkungan Kemendikbud.

Studi dokumentasi atau kepustakaan, yaitu melakukan studi melalui dokumentasi dan buku-buku kepustakaan lainnya atau bahan yang tersedia di PDSPK dan lingkungan Kemendikbud baik berupa data dan informasi yang tersedia di statistik pendidikan, aspek legalitas atau undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pedoman teknis maupun berbagai karya ilmiah penelitian lainnya mengenai data SDM pendidikan khususnya PAUD dan PNF.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan memilah item data yang digunakan untuk menjangkau data sekunder yang terkait dengan data SDM PAUD dan PNF. Sebagai responden adalah para pemegang data PAUD dan PNF di PDSPK dan direktorat terkait di lingkungan Kemendikbud. Teknik wawancara dan diskusi dilakukan kepada para responden tentang jenis data yang digunakan untuk analisis SDM PAUD dan PNF.

Analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tentang analisis SDM PAUD dan PNF menggunakan data tahun 2016. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang ditujukan untuk menjelaskan hasil analisis menggunakan data maupun menggunakan indikator pendidikan dengan diberikan interpretasi.

Penyajian data menggunakan data SDM PAUD dan PNF, indikator SDM berupa pendidik dan pengelola program PAUD dan PNF, dan kinerja SDM PAUD dan PNF disertai dengan grafik untuk memudahkan deskripsinya.

### B. Analisis SDM PAUD dan PNF

Dalam melakukan analisis SDM PAUD dan PNF digunakan data dan indikator PAUD dan PNF. Program pendidikan yang termasuk dalam PAUD dan PNF adalah pendidikan keaksaraan, PAUD/TK, paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA serta kursus. Berdasarkan data PAUD dan PNF maka dapat diketahui bagaimana potensi SDM PAUD dan PNF sehingga dapat digunakan untuk menghitung dan kekurangan/kelebihan pendidik dan diperoleh indikator rasio peserta didik per pendidik.

Berdasarkan indikator pendidikan maka diperoleh tujuh indikator SDM PAUD dan PNF yang dirinci menjadi dua, yaitu indikator dari pendidik dan dari pengelola. Indikator pendidik terdiri dari empat jenis, yaitu kelayakan pendidik mengajar berdasarkan ijazah S1 dan lebih tinggi yang dimiliki, pendidik perempuan, pendidik berasal dari guru, dan pendidik yang pernah mendapatkan pelatihan. Indikator pengelola terdiri dari tiga jenis, yaitu pengelola dengan ijazah S1 dan lebih tinggi, pengelola perempuan, dan pengelola yang pernah mendapatkan pelatihan. Selanjutnya, dengan menggunakan delapan indikator SDM, yaitu 1) rasio peserta didik per pendidik, 2) persentase pendidik berijazah S1 dan lebih tinggi, 3) persentase pendidik perempuan, 4) persentase pendidik dari guru, 5) persentase pendidik mendapat pelatihan, 6) persentase pengelola S1 dan lebih tinggi, 7) persentase pengelola perempuan, dan 8) persentase pengelola mendapat pelatihan maka dapat dihitung kinerja SDM PAUD dan PNF untuk setiap program pendidikan.

#### 1. Analisis Berdasarkan Data

Sesuai dengan program PAUD dan PNF maka analisis SDM PAUD dan PNF dilakukan dengan pertama kali melihat data potensi SDM PAUD dan PNF. Berdasarkan data SDM PAUD dan PNF tersebut dengan standar yang ditentukan dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan kekurangan/kelebihan pendidik. Selain itu, untuk mengetahui kekurangan/kelebihan pendidik juga dapat dilihat secara langsung dari indikator rasio peserta didik per pendidik (R-PD/P) dibandingkan dengan standar yang ditentukan untuk setiap program. Bila nilai R-PD/P lebih besar daripada standar maka berarti kekurangan pendidik, sebaliknya bila nilai R-PD/P lebih kecil daripada standar maka berarti telah kelebihan pendidik. (Kintamani, 2007).

Untuk menghitung kebutuhan pendidik PAUD dan PNF maka digunakan dua variabel data, yaitu peserta didik dan standar rasio peserta didik terhadap pendidik masing-masing program pendidikan.

Rumus yang digunakan adalah:

$$B_{\text{Pendidik } p} = \frac{PD \text{ } p}{\text{Standar } p}$$

Keterangan:

Bpendidik p adalah kebutuhan pendidik menurut program

PD p adalah peserta didik menurut program

Standar p adalah standar R-PD/P menurut program

Untuk menghitung kekurangan/kelebihan pendidik maka digunakan dua variabel data, yaitu pendidik menurut program pendidikan dengan kebutuhan pendidik menurut program pendidikan.

Rumus yang digunakan adalah:

+/- Pendidik p	=	Pendidik p	-	BPendidik p
----------------	---	------------	---	-------------

Keterangan:

+/- pendidik p adalah kekurangan/kelebihan pendidik menurut program

Bpendidik p adalah kebutuhan pendidik menurut program

Nilai idealnya adalah 0, artinya tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pendidik. Nilai – (minus) berarti kekurangan pendidik dan nilai + (positif) berarti kelebihan pendidik.

## 2. Analisis Berdasarkan Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan SDM PAUD dan PNF yang digunakan dalam analisis ini ada delapan jenis yang kesemuanya menunjukkan mutu pendidik dan pengelola dalam mengembangkan program-program PAUD dan PNF. Indikator tersebut terdiri dari pendidik dan pengelola. Untuk indikator dari pendidik digunakan 4 indikator, yaitu

- rasio peserta didik per pendidik (R-PD/P),
- persentase pendidik yang berijazah S1 dan lebih tinggi (%PS1+),
- persentase pendidik perempuan (%PPn),
- persentase pendidik berasal dari guru atau guru tetap (%PG),

Untuk indikator dari pengelola digunakan 2 indikator, yaitu

- persentase pengelola yang berijazah S1 dan lebih tinggi (%PAS1+),
- persentase pengelola perempuan (%PAPn).

Tidak semua program PAUD dan PNF memiliki ke 6 indikator SDM PAUD dan PNF karena perbedaan data yang dimiliki oleh setiap program. Pendidikan keaksaraan menggunakan 6 indikator, PAUD dan TK menggunakan 5 indikator, pendidikan kesetaraan yang dirinci menurut Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA menggunakan 6 indikator, sedangkan kursus hanya menggunakan 3 indikator. Sebaliknya, tidak semua indikator SDM PNF bisa diterapkan pada program PNF. R-PD/P, %PS1+, dan %PPn bisa diterapkan pada semua program yang dianalisis atau tujuh program PNF, %PG hanya bisa diterapkan di lima program kecuali PAUD dan kursus, %PAS1+ dan %PAPn bisa diterapkan di enam program selain kursus. Dengan demikian, jumlah indikator di tujuh program PAUD dan PNF sebesar 38 indikator. Indikator SDM PAUD dan PNF disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Indikator SDM PAUD dan PNF

No.	Jenis Indikator	Penjelasan	PK	PAUD	TK	Paket A	Paket B	Paket C	Kursus	Jumlah
A. Pendidik										
1	R-PD/P	Rasio Peserta Didik/Pendidik	v	v	v	v	v	v	v	7
2	%PS1+	%Pendidik S1 dan lebih tinggi	v	v	v	v	v	v	v	7
3	%PPn	%Pendidik Perempuan	v	v	v	v	v	v	v	7
4	%PG	%Pendidik Guru	v	v	-	v	v	v	-	5
B. Pengelola										
5	%PAS1+	%Pengelola S1 dan lebih tinggi	v	v	v	v	v	v	-	6
6	%PAPn	%Pengelola Perempuan	v	v	v	v	v	v	-	6
Jumlah			6	5	5	6	6	6	3	38

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, SDM PAUD dan PNF dimaksud terdiri dari pendidik dan pengelola. Untuk menghitung indikator SDM PAUD dan PNF yang berasal dari pendidik, berikut ini disajikan definisi, data dasar yang digunakan, rumusan, kriteria, dan kegunaannya.

1. Rasio peserta didik per pendidik (R-PD/Pp)

Definisi: Perbandingan antara peserta didik dengan pendidik program PAUD dan PNF tertentu

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah peserta didik
- 2) Jumlah pendidik

Rumus yang digunakan:

$$R-PD/P p = \frac{PD p}{P p}$$

Keterangan:

PD p adalah peserta didik menurut program

P p adalah pendidik menurut program

Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin kurang pendidik, sebaliknya makin rendah nilainya berarti makin kelebihan pendidik dijadikan standar untuk setiap program. Belum ada kriteria ideal.

Kegunaan: Untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan pendidik dikaitkan dengan standar untuk setiap program.

2. Persentase pendidik berijazah S1 dan lebih tinggi (%PS1+)

Definisi: Perbandingan antara pendidik yang berijazah S1 dan lebih tinggi dengan jumlah pendidik seluruhnya dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah pendidik menurut ijazah tertinggi
- 2) Jumlah pendidik

Rumus yang digunakan:

$\%PS_{1+p}$	$=$	$\frac{PS_{1+p}}{P_{sel p}}$	$\times$	100
--------------	-----	------------------------------	----------	-----

Keterangan:

$PS_{1+p}$  adalah pendidik S1 dan lebih tinggi

$P_{sel p}$  adalah pendidik seluruhnya

Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin baik, nilai ideal = 100% berarti semua pendidik telah sesuai dengan yang disyaratkan.

Kegunaan: Untuk mengetahui berapa pendidik yang perlu disetarakan sehingga dapat meningkatkan mutu program PAUD dan PNF.

(Sekretariat Negara, 2005).

### 3. Persentase pendidik perempuan (%PPn)

Definisi: Perbandingan antara pendidik perempuan dengan jumlah pendidik seluruhnya dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah pendidik menurut jenis kelamin
- 2) Jumlah pendidik

Rumus yang digunakan:

$\%PP_n p$	$=$	$\frac{PP_n p}{P_{sel p}}$	$\times$	100
------------	-----	----------------------------	----------	-----

Keterangan:

$PP_n p$  adalah pendidik perempuan

$P_{sel p}$  adalah pendidik seluruhnya

Kriteria: Nilai idealnya = 50%, jadi nilai lebih atau kurang dari 50% berarti kurang baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui apakah ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ketika menjadi pendidik PNF atau apakah telah ada kesempatan yang sama untuk menjadi pendidik PNF.

### 4. Persentase pendidik berasal dari guru (%PG)

Definisi: Perbandingan antara pendidik yang berasal dari guru dengan jumlah pendidik seluruhnya dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah pendidik menurut asal
- 2) Jumlah pendidik

Rumus yang digunakan:



$\%PG\ p$	$=$	$\frac{PG\ p}{P\ sel\ p}$	$\times$	$100$
-----------	-----	---------------------------	----------	-------

Keterangan:

PG p adalah pendidik yang berasal dari guru

Psel p adalah pendidik seluruhnya

Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin baik, nilai ideal = 100%, yang berarti semua pendidik berasal dari guru.

Kegunaan: Untuk mengetahui berapa pendidik yang tidak berasal dari guru sehingga perlu mendapatkan pelatihan tentang PNF sehingga dapat meningkatkan mutu PNF.

#### 5. Persentase pengelola berijazah S1 dan lebih tinggi (%PAS1+)

Definisi: Perbandingan antara pengelola yang berijazah S1 dan lebih tinggi dengan jumlah pengelola seluruhnya dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

1) Jumlah pengelola menurut ijazah tertinggi

2) Jumlah pengelola

Rumus yang digunakan:

$\%PAS1+ p$	$=$	$\frac{PAS1+ p}{PA\ sel\ p}$	$\times$	$100$
-------------	-----	------------------------------	----------	-------

Keterangan:

PA1+ p adalah pengelola S1 dan lebih tinggi

PA sel p adalah pengelola seluruhnya

Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin baik, nilai ideal = 100%.

Kegunaan: Untuk mengetahui berapa pengelola yang perlu disetarakan sehingga dapat meningkatkan mutu program PAUD dan PNF yang dikelolanya.

#### 6. Persentase pengelola perempuan (%PAPn)

Definisi: Perbandingan antara pengelola perempuan dengan jumlah pengelola seluruhnya dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

1) Jumlah pengelola menurut jenis kelamin

2) Jumlah pengelola

Rumus yang digunakan:

$\%PAPn\ p$	$=$	$\frac{PAPn\ p}{PA\ sel\ p}$	$\times$	$100$
-------------	-----	------------------------------	----------	-------

Keterangan:

PAPn p adalah pengelola perempuan

PAsel p adalah pengelola seluruhnya

Kriteria: Nilai idealnya = 50%, jadi nilai lebih atau kurang dari 50% berarti belum baik karena tidak memberikan kesempatan yang sama menjadi pengelola PAUD dan PNF.

Kegunaan: Untuk mengetahui apakah ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi pengelola PAUD dan PNF.

### C. Kinerja SDM PAUD dan PNF Berdasarkan Indikator Pendidikan

Sesuai dengan indikator SDM yang digunakan dalam analisis SDM PAUD dan PNF maka kinerja SDM PAUD dan PNF juga dihitung dari ke-6 indikator SDM yang dijelaskan di atas. Ke-6 indikator SDM PAUD dan PNF yang disajikan adalah menunjukkan mutu pendidikan PAUD dan PNF, oleh karena itu makin tinggi nilainya menunjukkan mutu makin meningkat. Nilai ideal adalah 100 dan minimal adalah 0.

Ketentuan atau standar yang digunakan untuk setiap indikator dan setiap program berbeda karena perbedaan data yang dimiliki disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Standar Menentukan Indikator SDM PAUD dan PNF

No.	Jenis Indikator	PK	PAUD	TK	Paket A	Paket B	Paket C	Kursus	Jumlah
A. Pendidik									
1	R-PD/P	10.00	30.00	20.00	20.00	15.00	10.00	40.00	7
2	%PS1+	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	7
3	%PPn	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	7
4	%PG	100.00	100.00	-	100.00	100.00	100.00	-	5
B. Pengelola									
5	%PAS1+	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	6
6	%PAPn	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-	6
Jumlah		6	6	5	6	6	6	3	38

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa:

- Indikator R-PD/P untuk setiap program PNF menggunakan standar yang berbeda karena menggunakan angka nasional.
- Indikator %PS1+ menggunakan standar ideal 100%, artinya semua pendidik harusnya memiliki ijazah S1 semuanya, kecuali pendidikan keaksaraan dan PAUD ditentukan sebesar 50%.
- Indikator %PPn untuk setiap program menggunakan standar ideal 50%, artinya pendidik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama menjadi pendidik.
- Indikator %PG atau %PT khusus TK untuk setiap program menggunakan standar ideal 100%, artinya semua pendidik harusnya berasal dari guru

kecuali PAUD dan kursus karena tidak tersedia data dan pendidik TK harusnya tetap supaya menghasilkan mutu yang baik.

- e. Indikator %PAS1+ menggunakan standar ideal 100%, artinya semua pengelola harusnya memiliki ijazah S1, kecuali pendidikan keaksaraan dan PAUD sebesar 50%.
- f. Indikator %PAPn untuk setiap program menggunakan standar ideal 50%, artinya pengelola laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama menjadi pengelola, kecuali kursus karena tidak tersedia data.

Oleh karena indikator tersebut tidak semuanya dapat dikategorikan ideal sebesar 100% maka diperlukan standarisasi untuk menentukan mutu pendidik dan pengelola yang baik. Untuk memudahkan memahami dalam pencapaian kinerja SDM PNF maka digunakan lima jenis kinerja, yaitu paripurna, utama, madya, pratama, dan kurang yang disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3  
Jenis Kinerja SDM PAUD dan PNF

No.	Jenis Kinerja	Nilai
1	Paripurna	90.00--100.00
2	Utama	80.00--89.99
3	Madya	70.00--79.99
4	Pratama	60.00--69.99
5	Kurang	kurang dari 60.00

## BAB IV HASIL DAN BAHASAN

### A. Potensi SDM PAUD dan PNF

Untuk mengetahui bagaimana potensi SDM PAUD dan PNF maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang sumber data, variabel serta data SDM PAUD dan PNF. Untuk melakukan analisis SDM PAUD dan PNF adalah statistik PAUD dan Statistik PNF tahun 2016 disertai data yang berasal dari data pokok pendidikan nonformal (Dapodik NF) tahun 2016 sebagai bahan pelengkap. Statistik yang dimaksud adalah:

1. Statistik PAUD
2. Statistik Taman Kanak - Kanak
3. Statistik Keaksaraan
4. Statistik Pendidikan Kesetaraan
5. Statistik Kursus

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya maka variabel data yang digunakan dalam analisis SDM PNF terdiri dari tiga jenis data dengan rincian sehingga terdapat 8 jenis variabel data, yaitu

1. peserta didik,
  - a. menurut ijazah
  - b. menurut jenis kelamin,
  - c. menurut pekerjaan, dan
2. pendidik
  - a. menurut ijazah
  - b. menurut jenis kelamin,
  - c. menurut pekerjaan, dan
3. pengelola
  - a. menurut ijazah,
  - b. menurut jenis kelamin, dan

Tabel 4.1  
Variabel Data SDM PAUD DAN PNF

No.	Jenis Data	PK	PAUD	TK	Paket A	Paket B	Paket C	Kursus	Jumlah
1	Peserta Didik (PD)	v	v	v	v	v	v	v	7
2	Pendidik (P)								
	a. Menurut Ijazah	v	v	v	v	v	v	v	7
	b. Menurut Jenis Kelamin	v	v	v	v	v	v	v	7
	c. Menurut Pekerjaan	v	v	-	v	v	v	-	5
3	Pengelola (PA)								
	a. Menurut Ijazah	v	v	v	v	v	v	-	6
	b. Menurut Jenis Kelamin	v	v	v	v	v	v	-	6
	Jumlah	6	6	5	6	6	6	3	38

Tidak semua jenis data terdapat pada setiap program PAUD dan PNF. Pendidikan keaksaraan memiliki 6 jenis data, TK dan PAUD memiliki 5 jenis

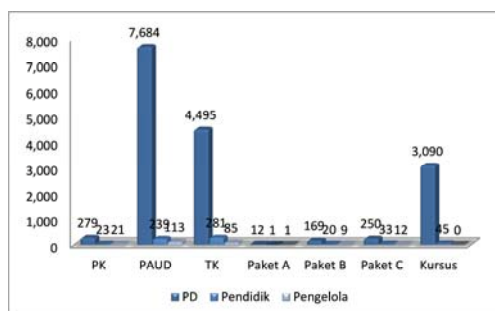
data, pendidikan kesetaraan memiliki enam jenis, dan kursus hanya tiga jenis. Variabel data SDM PAUD dan PNF disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.2  
Data SDM PAUD dan PNF Menurut Program  
Tahun 2015

No.	Jenis Program	Peserta Didik (PD)	Pendidik (P)	Pengelola (PA)	R-PD/P	R-P/PA
1	Pendidikan Keaksaraan (PK) *)	279,440	23,215	20,745	12	1
2	PAUD	7,684,246	238,867	113,185	32	2
3	Taman Kanak-kanak	4,495,432	281,136	85,499	16	3
4	Paket A setara SD	11,583	933	1,282	12	1
5	Paket B setara SMP	169,086	20,318	8,948	8	2
6	Paket C setara SMA	249,717	32,677	11,646	8	3
7	Kursus	3,090,438	45,175	...	68	...
	Jumlah	15,979,942	642,321	241,305	25	3

Catatan: \*) tahun 2014

Grafik 4.1  
Data SDM PAUD dan PNF Menurut Program  
Tahun 2015



Berdasarkan variabel data SDM PAUD dan PNF maka pada Tabel 4.2 dan Grafik 4.1 disajikan data SDM PAUD dan PNF menurut program yang meliputi peserta didik, pendidik, dan pengelola. Peserta didik semua program PAUD dan PNF yang terdiri dari 7 program sebesar 15.979.942 ribu anak/orang, pendidik sebesar 642.321 ribu orang dan pengelola tanpa pengelola kursus sebesar 241.305 ribu orang. Peserta didik program PAUD yang terbesar sebesar 7.684.246 anak diikuti program TK sebesar 4.495.432 anak, dan terkecil paket A setara SD sebesar 11.583 anak. Besarnya peserta didik juga menyebabkan besarnya pendidik pada program PAUD sebesar 238.867 ribu orang, diikuti program TK sebesar 281.136 ribu orang. Bila dilihat jumlah pengelola maka pengelola terbesar juga pada program PAUD sebesar

113.185 ribu orang, diikuti program TK sebesar 85.499 ribu dan terkecil program paket A setara SD sebesar 1.282 orang.

Namun, bila dibandingkan antara peserta didik dengan pendidik maka rasio terbesar pada kursus sebesar 68 orang, berarti pendidik melayani 68 orang peserta didik dan terkecil pada paket B setara SMP dan Paket C setara SMA sebesar 8 orang. Bila digunakan rata-rata 7 program tersebut maka R-PD/P sebesar 25, hal ini menunjukkan PAUD dan kursus masih kekurangan pendidik, sebaliknya program lainnya terutama paket B setara SMP dan paket C setara SMA telah kelebihan pendidik.

Bila dibandingkan rasio pendidik dengan pengelola maka pendidik lebih banyak di program TK dan Paket C Setara SMA sebesar 3 dan terkecil pada program pendidikan keaksaraan dan paket A setara SD masing-masing sebesar 1 orang. Bila digunakan rata-rata 7 program tersebut maka R-P/PA sebesar 3, hal ini menunjukkan pendidikan keaksaraan, paket A setara SD masih kekurangan pendidik, sebaliknya program lainnya terutama TK yang paling banyak memiliki pendidik. Hal ini bisa dimaklumi karena untuk mengajar di TK memang di tiap kelas dibutuhkan guru dan pengasuh sehingga minimal ada 2 guru di kelas.

Tabel 4.3  
Data SDM PAUD dan PNF Menurut Program Tiap Provinsi  
Tahun 2015

No.	Provinsi	Pendidikan Keaksaraan *)			PAUD			Taman Kanak2			Paket A		
		PD	Pendidik	Pengelola	PD	Pendidik	Pengelola	PD	Pendidik	Pengelola	PD	Pendidik	Pengelola
1	DKI Jakarta	620	59	50	282.937	3.897	2.010	127.756	8.154	2.295	211	24	34
2	Jawa Barat	37.400	3.149	2.727	1.599.489	43.592	20.416	406.495	29.367	8.119	692	44	72
3	Banten	2.500	211	187	326.622	9.243	4.992	173.453	7.841	2.023	383	23	50
4	Jawa Tengah	21.420	1.804	1.665	729.795	34.401	13.616	695.733	44.473	14.090	596	45	66
5	DI Yogyakarta	1.510	127	109	106.730	7.661	3.169	97.802	8.020	2.136	49	4	6
6	Jawa Timur	50.600	4.261	3.851	1.007.614	45.781	21.016	938.293	64.169	18.163	825	52	84
7	Aceh	1.000	84	74	140.495	4.869	2.382	105.201	8.350	2.184	329	25	39
8	Sumatera Utara	7.000	589	519	609.635	12.045	7.217	193.472	5.742	2.309	383	47	39
9	Sumatera Barat	3.180	268	238	198.545	5.897	3.453	90.097	6.957	2.357	410	33	52
10	Riau	1.000	84	77	210.620	4.936	2.516	105.282	6.647	2.070	292	21	34
11	Kepulauan Riau	1.100	93	85	84.941	1.147	692	46.337	2.221	596	74	7	6
12	Jambi	1.000	83	74	140.953	4.666	2.239	42.633	3.238	1.189	360	32	36
13	Sumatera Selatan	1.980	167	166	299.629	8.238	2.996	79.323	6.434	1.761	289	21	42
14	Bangka Belitung	500	42	42	54.263	2.199	679	32.149	1.691	346	189	13	22
15	Bengkulu	2.500	209	207	67.870	2.389	1.210	38.476	3.234	948	233	18	28
16	Lampung	3.100	260	257	255.141	6.829	2.952	121.861	9.124	2.701	235	17	25
17	Kalimantan Barat	10.480	882	794	154.786	3.295	1.882	56.402	2.791	731	292	22	21
18	Kalimantan Tengah	1.350	114	113	70.970	1.736	908	62.269	3.970	1.490	331	29	56
19	Kalimantan Selatan	3.100	261	228	91.602	3.682	1.582	102.378	10.443	2.365	331	46	39
20	Kalimantan Timur	1.350	114	102	79.056	2.643	1.436	54.308	4.048	1.253	519	40	38
21	Kalimantan Utara	760	64	57	20.351	922	369	13.640	629	169	81	6	6
22	Sulawesi Utara	1.690	142	124	52.905	894	720	69.912	1.132	1.110	272	17	45
23	Gorontalo	1.410	119	104	44.558	1.473	978	30.597	1.829	755	297	26	26
24	Sulawesi Tengah	5.860	494	450	112.997	2.782	1.234	86.762	4.246	1.799	445	32	52
25	Sulawesi Selatan	13.810	1.163	1.030	194.389	5.266	2.265	219.983	12.657	3.954	586	61	51
26	Sulawesi Barat	1.000	84	74	47.359	1.729	934	22.312	1.131	676	161	24	13
27	Sulawesi Tenggara	6.270	528	455	54.445	1.661	744	94.497	4.848	1.719	470	30	44
28	Maluku	1.050	91	90	61.243	816	651	22.568	571	465	416	22	27
29	Maluku Utara	2.000	167	148	42.912	1.181	595	23.165	1.045	484	478	30	57
30	Bali	4.150	349	309	111.235	2.399	1.583	86.185	5.314	1.593	53	18	6
31	Nusa Tenggara Barat	11.500	645	590	134.197	5.857	2.306	115.762	6.765	1.658	262	15	46
32	Nusa Tenggara Timur	8.200	691	607	183.717	3.190	2.444	86.556	2.389	1.174	352	24	33
33	Papua	58.260	4.907	4.355	86.333	591	476	39.952	1.192	493	581	44	74
34	Papua Barat	10.790	910	787	25.912	960	523	13.821	474	324	106	21	13
	Indonesia	279,440	23,215	20,745	7,684,246	238,867	113,185	4,495,432	281,136	85,499	11,583	933	1,282

\*Catatan: PD adalah peserta didik

Bila dilihat di tiap program di setiap provinsi yang terdapat pada Tabel 4.3 peserta didik pendidikan keaksaraan sebesar 279.440 ribu orang, terbesar adalah pada Provinsi Papua sebesar 58.260 ribu orang dan terkecil pada provinsi Bangka Belitung sebesar 500 orang. Bila dilihat dari pendidik dan pengelola maka Provinsi Papua terbesar masing-masing sebesar 4.907 orang dan 4.355 orang, sedangkan terkecil juga pada Provinsi Maluku masing-masing sebesar 42 orang.

Peserta didik program PAUD sebesar 7.684.246 juta anak, terbesar pada Provinsi Jawa Barat sebesar 1.599.489 juta anak dan terkecil pada Provinsi Papua Barat sebesar 25.912 ribu anak. Pendidik dan pengelola terbesar pada Provinsi Jawa Timur masing-masing sebesar 45.781 ribu orang dan 21.016 ribu orang. Sebaliknya, pendidik dan pengelola terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat masing-masing sebesar 960 dan 523 orang. Peserta didik program TK sebesar 4.495.432 juta, terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 938.293 ribu dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 13.640 ribu. Pendidik dan pengelola terbesar pada Provinsi Jawa Timur masing-masing sebesar 64.169 ribu orang dan 18.163 ribu orang. Sebaliknya, pendidik terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat 474 orang dan pengelola terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 324 orang.

Peserta didik program paket A setara SD sebesar 11.583 ribu orang terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 825 orang dan terkecil pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 49 orang. Pendidik terbesar pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 61 orang dan pengelola terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 84 orang. Sebaliknya, pendidik terkecil terjadi di Provinsi D. I. Yogyakarta sebesar 4 orang dan pengelola terkecil terjadi di Provinsi D. I. Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara dan Bali Papua Barat sebesar 6 orang.

Berdasarkan Tabel 4.3 Peserta didik program paket B setara SMP sebesar 169.086 ribu orang, terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 22.597 ribu orang dan terkecil pada Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1.204 orang. Pendidik dan pengelola terbesar pada Provinsi Jawa Barat masing-masing sebesar 4.240 orang dan 1.767 orang. Sebaliknya, pendidik dan pengelola terkecil terjadi di Provinsi Papua masing-masing sebesar 32 dan 17 orang.

Peserta didik program paket C setara SMA sebesar 249.717 ribu orang, terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 47.445 ribu orang dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 144 orang. Pendidik dan pengelola terbesar juga pada Provinsi Jawa Timur masing-masing sebesar 7.322 orang dan 2.124 orang. Sebaliknya, pendidik dan pengelola terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara masing-masing sebesar 28 dan 10 orang.

Peserta didik dan pendidik program kursus masing-masing sebesar 3.090.438 juta orang dan 45.175 ribu orang, terbesar pada Provinsi Jawa

Timur masing-masing sebesar 504.650 ribu orang dan 7.891 orang, sedangkan terkecil pada Provinsi Papua Barat masing-masing sebesar 6.183 orang dan 66 orang.

Dengan demikian, dari tujuh program PNF terdapat 15.979.942 juta peserta didik, 642.321 ribu pendidik, dan 241.305 ribu pengelola. Hal ini berarti program PNF sebagai pendukung pendidikan formal memang sangat berarti dan cukup penting perannya karena bisa menampung 15.979.942 juta peserta didik.

Tabel 4.3 lanjutan  
Data SDM PAUD dan PNF menurut Program Tiap Provinsi  
Tahun 2015

Provinsi	Paket B			Paket C			Kursus		Jumlah *)		
	PD	Pendidik	Pengelola	PD	Pendidik	Pengelola	PD	Pendidik	PD	Pendidik	Pengelola
DKI Jakarta	1,939	320	199	7,346	1,247	638	137,412	1,537	558,221	15,238	5,226
Jawa Barat	22,057	3,290	2,031	11,278	1,779	962	435,578	6,901	2,512,989	88,122	34,327
Banten	5,705	576	159	17,564	2,480	720	94,805	1,353	621,032	21,727	8,131
Jawa Tengah	14,219	2,263	1,264	36,893	6,098	2,033	339,277	5,582	1,837,933	94,666	32,734
DI Yogyakarta	923	150	88	2,870	463	230	48,790	1,083	258,674	17,508	5,738
Jawa Timur	22,597	3,448	889	47,445	7,322	2,124	504,650	7,891	2,572,024	132,924	46,127
Aceh	6,851	677	298	11,786	1,264	368	75,686	843	341,348	16,112	5,345
Sumatera Utara	1,340	109	38	5,384	561	214	221,249	2,665	1,038,463	21,758	10,336
Sumatera Barat	880	60	30	2,422	221	88	89,325	1,207	384,859	14,643	6,218
Riau	2,033	164	84	8,913	762	372	41,837	706	369,977	13,320	5,153
Kepulauan Riau	4,021	406	105	4,470	472	133	59,284	688	200,227	5,034	1,617
Jambi	781	67	26	2,846	253	84	51,184	657	239,757	8,996	3,648
Sumatera Selatan	8,119	605	225	5,657	462	157	104,060	1,419	499,057	17,346	5,347
Bangka Belitung	2,007	146	70	3,374	278	143	21,519	305	114,001	4,674	1,302
Bengkulu	4,138	284	119	4,018	343	156	47,366	540	164,601	7,017	2,668
Lampung	4,106	247	118	5,628	510	157	99,920	1,391	489,991	18,378	6,210
Kalimantan Barat	3,261	347	94	3,809	447	154	36,076	532	265,106	8,316	3,676
Kalimantan Tengah	4,065	537	275	3,440	474	208	23,705	473	166,130	7,333	3,050
Kalimantan Selatan	5,352	836	340	4,567	747	207	56,231	906	263,561	16,921	4,761
Kalimantan Timur	2,399	399	180	1,798	304	102	57,243	1,070	196,673	8,618	3,111
Kalimantan Utara	972	215	80	144	28	10	4,702	43	40,650	1,907	691
Sulawesi Utara	1,204	182	135	2,705	421	203	51,745	555	180,433	3,343	2,337
Gorontalo	2,493	133	75	1,255	102	81	17,763	199	98,373	3,881	2,019
Sulawesi Tengah	2,883	432	198	2,574	351	162	51,378	828	262,899	9,165	3,895
Sulawesi Selatan	6,065	851	336	2,983	407	99	85,725	1,247	523,541	21,652	7,735
Sulawesi Barat	3,962	441	148	2,429	274	74	25,646	442	102,869	4,125	1,919
Sulawesi Tenggara	12,171	684	270	5,706	442	222	35,902	499	209,461	8,692	3,454
Maluku	2,783	289	124	4,808	546	214	15,715	216	108,583	2,551	1,571
Maluku Utara	7,106	1,091	455	4,772	784	173	24,896	206	105,329	4,504	1,912
Bali	2,187	274	117	4,737	621	195	83,601	1,196	292,148	10,171	3,803
Nusa Tenggara Barat	3,090	315	167	6,279	685	396	80,103	1,140	351,193	15,422	5,163
Nusa Tenggara Timur	2,425	250	78	2,984	318	93	54,563	688	338,797	7,550	4,429
Papua	3,554	191	95	12,858	969	350	7,319	101	208,857	7,995	5,843
Papua Barat	1,398	39	38	3,975	242	124	6,183	66	62,185	2,712	1,809
Indonesia	169,086	20,318	8,948	249,717	32,677	11,646	3,090,438	45,175	15,979,942	642,321	241,305

Catatan: \*PD adalah Peserta Didik

\* Jumlah pengelola tidak termasuk kursus karena tidak tersedia data

## B. Kebutuhan dan Kekurangan/Kelebihan SDM PAUD dan PNF

Kebutuhan SDM PAUD dan PNF dapat dihitung untuk tujuh jenis program dengan menggunakan standar yang ditentukan untuk setiap jenis program, khusus untuk pendidik. Standar yang digunakan untuk menghitung kebutuhan pendidik dapat dilihat pada Tabel 3.2. Dengan menggunakan peserta didik dan standar tersebut maka dapat dihitung kebutuhan pendidik menurut program. Tabel 4.4 adalah hasil perhitungan kebutuhan pendidik menurut program tiap provinsi. Kebutuhan pendidik PK sebesar 27.944 orang dengan tertinggi pada Provinsi Papua sebesar 5.826 orang dan terkecil



pada Provinsi Bangka Belitung sebesar 50 orang. Kebutuhan pendidik PAUD sebesar 256.142 orang dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Barat sebesar 53.316 orang dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 682 orang. Kebutuhan pendidik TK sebesar 224.773 dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Timur sebesar 34.787 orang dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 682. Kebutuhan pendidik paket A setara SD sebesar 582 dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Timur sebesar 41 orang dan terkecil pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 2. Kebutuhan pendidik paket B setara SMP sebesar 11.272 dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Timur sebesar 1.506 orang dan terkecil pada Provinsi Jambi sebesar 52. Kebutuhan pendidik paket C setara SMA sebesar 31.218 dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Timur sebesar 5.931 orang dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 18. Kebutuhan pendidik kursus sebesar 77.262 dengan tertinggi pada Provinsi Jawa Timur sebesar 12.616 orang dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 118. Dengan demikian, semua program PAUD dan PNF membutuhkan 626.193 pendidik dengan rincian terbesar di Provinsi Jawa Timur sebesar 105.656 orang dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1.641 orang.

Tabel 4.4  
Kebutuhan Pendidik PAUD dan PNF  
menurut Program Tiap Provinsi

No.	Provinsi	PK *)	PAUD	TK	Paket A	Paket B	Paket C	Kursus	Jumlah
1	DKI Jakarta	62	9,431	6,388	11	129	918	3,435	20,374
2	Jawa Barat	3,740	53,316	20,325	35	1,470	1,410	10,889	91,185
3	Banten	250	10,887	8,673	19	380	2,196	2,370	24,775
4	Jawa Tengah	2,142	24,327	34,787	30	948	4,612	8,482	75,328
5	DI Yogyakarta	151	3,558	4,890	2	62	359	1,220	10,242
6	Jawa Timur	5,060	33,587	46,915	41	1,506	5,931	12,616	105,656
7	Aceh	100	4,683	5,260	16	457	1,473	1,892	13,881
8	Sumatera Utara	700	20,321	9,674	19	89	673	5,531	37,007
9	Sumatera Barat	318	6,618	4,505	21	59	303	2,233	14,057
10	Riau	100	7,021	5,264	15	136	1,114	1,046	14,696
11	Kepulauan Riau	110	2,831	2,317	4	268	559	1,482	7,571
12	Jambi	100	4,698	2,132	18	52	356	1,280	8,636
13	Sumatera Selatan	198	9,988	3,966	14	541	707	2,602	18,016
14	Bangka Belitung	50	1,809	1,607	9	134	422	538	4,569
15	Bengkulu	250	2,262	1,924	12	276	502	1,184	6,410
16	Lampung	310	8,505	6,093	12	274	704	2,498	18,396
17	Kalimantan Barat	1,048	5,160	2,820	15	217	476	902	10,638
18	Kalimantan Tengah	135	2,366	3,113	17	271	430	593	6,925
19	Kalimantan Selatan	310	3,053	5,119	17	357	571	1,406	10,833
20	Kalimantan Timur	135	2,635	2,715	26	160	225	1,431	7,327
21	Kalimantan Utara	76	678	682	4	65	18	118	1,641
22	Sulawesi Utara	169	1,764	3,496	14	80	338	1,294	7,155
23	Gorontalo	141	1,485	1,530	15	166	157	444	3,938
24	Sulawesi Tengah	586	3,767	4,338	22	192	322	1,284	10,511
25	Sulawesi Selatan	1,381	6,480	10,999	29	404	373	2,143	21,809
26	Sulawesi Barat	100	1,579	1,116	8	264	304	641	4,012
27	Sulawesi Tenggara	627	1,815	4,725	24	811	713	898	9,613
28	Maluku	105	2,041	1,128	21	186	601	393	4,475
29	Maluku Utara	200	1,430	1,158	24	474	597	622	4,505
30	Bali	415	3,708	4,309	3	146	592	2,090	11,263
31	Nusa Tenggara Barat	1,150	4,473	5,788	13	206	785	2,003	14,418
32	Nusa Tenggara Timur	820	6,124	4,328	18	162	373	1,364	13,189
33	Papua	5,826	2,878	1,998	29	237	1,607	183	12,758
34	Papua Barat	1,079	864	691	5	93	497	155	3,384
	Indonesia	27,944	256,142	224,773	582	11,272	31,218	77,262	629,193

Catatan : \*Data Tahun 2014

Berdasarkan kebutuhan pendidik PAUD dan PNF maka dapat dihitung kekurangan/kelebihan pendidik di masing-masing program pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4.5. Secara nasional PK, PAUD dan kursus masih kekurangan 4.712, 17.275, dan 32.087 orang, sedangkan program lainnya sudah kelebihan, yaitu TK, Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA masing-masing sebesar 56.363, 351, 9.046, dan 1.459 orang.

**Tabel 4.5**  
Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF menurut Program Tiap Provinsi Tahun 2015

No.	Provinsi	PK *)	PAUD	TK	Paket A	Paket B	Paket C	Kursus	Jumlah
1	DKI Jakarta	-3	-5,534	1,766	13	191	329	-1,898	-5,136
2	Jawa Barat	-591	-9,724	9,042	9	1,820	369	-3,988	-3,063
3	Banten	-39	-1,644	-832	4	196	284	-1,017	-3,048
4	Jawa Tengah	-338	10,074	9,686	15	1,315	1,486	-2,900	19,338
5	DI Yogyakarta	-24	4,103	3,130	2	88	104	-137	7,266
6	Jawa Timur	-799	12,194	17,254	11	1,942	1,391	-4,725	27,268
7	Aceh	-16	186	3,090	9	220	-209	-1,049	2,231
8	Sumatera Utara	-111	-8,276	-3,932	28	20	-112	-2,866	-15,249
9	Sumatera Barat	-50	-721	2,452	12	1	-82	-1,026	586
10	Riau	-16	-2,085	1,383	6	28	-352	-340	-1,376
11	Kepulauan Riau	0	-1,684	-96	3	138	-87	-794	-2,520
12	Jambi	-17	-32	1,106	14	15	-103	-623	360
13	Sumatera Selatan	-31	-1,750	2,468	7	64	-245	-1,183	-670
14	Bangka Belitung	-8	390	84	4	12	-144	-233	105
15	Bengkulu	-41	127	1,310	6	8	-159	-644	607
16	Lampung	-50	-1,676	3,031	5	-27	-194	-1,107	-18
17	Kalimantan Barat	-166	-1,865	-29	7	130	-29	-370	-2,322
18	Kalimantan Tengah	-21	-630	857	12	266	44	-120	408
19	Kalimantan Selatan	-49	629	5,324	29	479	176	-500	6,088
20	Kalimantan Timur	-21	8	1,333	14	239	79	-361	1,291
21	Kalimantan Utara	-12	244	-53	2	150	10	-75	266
22	Sulawesi Utara	-27	-870	-2,364	3	102	83	-739	-3,812
23	Gorontalo	-22	-12	299	11	-33	-55	-245	-57
24	Sulawesi Tengah	-92	-985	-92	10	240	29	-456	-1,346
25	Sulawesi Selatan	-218	-1,214	1,658	32	447	34	-896	-157
26	Sulawesi Barat	-16	150	15	16	177	-30	-199	113
27	Sulawesi Tenggara	-99	-154	123	6	-127	-271	-399	-921
28	Maluku	-14	-1,225	-557	1	103	-55	-177	-1,924
29	Maluku Utara	-33	-249	-113	6	617	187	-416	-1
30	Bali	-66	-1,309	1,005	15	128	29	-894	-1,092
31	Nusa Tenggara Barat	-505	1,384	977	2	109	-100	-863	1,004
32	Nusa Tenggara Timur	-129	-2,934	-1,939	6	88	-55	-676	-5,639
33	Papua	-919	-2,287	-806	15	-46	-638	-82	-4,763
34	Papua Barat	-169	96	-217	16	-54	-255	-89	-672
	Indonesia	-4,712	-17,275	56,363	351	9,046	1,459	-32,087	13,145

Catatan : \*Data Tahun 2014

Walaupun secara nasional PK kekurangan pendidik namun Provinsi Kepulauan Riau tidak kekurangan maupun kelebihan pendidik. Demikian juga PAUD, walaupun secara nasional kekurangan pendidik namun terdapat 8 provinsi yang kelebihan dan yang terkecil sebesar 8 orang di Provinsi Kalimantan Timur sampai yang terbesar 12.194 orang di Provinsi Jawa Timur. TK secara nasional telah kelebihan pendidik namun terdapat 12 provinsi yang

masih kekurangan dari yang terkecil sebesar 29 orang di Provinsi Kalimantan Barat sampai yang terbesar sebesar 3.932 orang di Provinsi Sumatera Utara. Paket A setara SD semua provinsi dalam kondisi kelebihan, Paket B setara SMP secara nasional kelebihan pendidik namun terdapat 5 provinsi yang masih kekurangan pendidik, dan Paket C setara SMA secara nasional kelebihan pendidik namun ada 19 Provinsi yang kekurangan pendidik. Untuk Kursus semua provinsi masih kekurangan pendidik.

Tabel 4.6  
Rasio Peserta Didik per Pendidik PAUD dan PNF menurut Program Tiap  
Provinsi  
Tahun 2015

No.	Provinsi	PK *)	PAUD	TK	Paket A	Paket B	Paket C	Kursus	Rata2
1	DKI Jakarta	11	73	16	9	6	6	89	37
2	Jawa Barat	12	37	14	16	7	6	63	29
3	Banten	12	35	22	17	10	7	70	29
4	Jawa Tengah	12	21	16	13	6	6	61	19
5	DI Yogyakarta	12	14	12	12	6	6	45	15
6	Jawa Timur	12	22	15	16	7	6	64	19
7	Aceh	12	29	13	13	10	9	90	21
8	Sumatera Utara	12	51	34	8	12	10	83	48
9	Sumatera Barat	12	34	13	12	15	11	74	26
10	Riau	12	43	16	14	12	12	59	28
11	Kepulauan Riau	12	74	21	11	10	9	86	40
12	Jambi	12	30	13	11	12	11	78	27
13	Sumatera Selatan	12	36	12	14	13	12	73	29
14	Bangka Belitung	12	25	19	15	14	12	71	24
15	Bengkulu	12	28	12	13	15	12	88	23
16	Lampung	12	37	13	14	17	11	72	27
17	Kalimantan Barat	12	47	20	13	9	9	68	32
18	Kalimantan Tengah	12	41	16	11	8	7	50	23
19	Kalimantan Selatan	12	25	10	7	6	6	62	16
20	Kalimantan Timur	12	30	13	13	6	6	53	23
21	Kalimantan Utara	12	22	22	14	5	5	109	21
22	Sulawesi Utara	12	59	62	16	7	6	93	54
23	Gorontalo	12	30	17	11	19	12	89	25
24	Sulawesi Tengah	12	41	20	14	7	7	62	29
25	Sulawesi Selatan	12	37	17	10	7	7	69	24
26	Sulawesi Barat	12	27	20	7	9	9	58	25
27	Sulawesi Tenggara	12	33	19	16	18	13	72	24
28	Maluku	12	75	40	19	10	9	73	43
29	Maluku Utara	12	36	22	16	7	6	121	23
30	Bali	12	46	16	3	8	8	70	29
31	Nusa Tenggara Barat	18	23	17	17	10	9	70	23
32	Nusa Tenggara Timur	12	58	36	15	10	9	79	45
33	Papua	12	146	34	13	19	13	72	26
34	Papua Barat	12	27	29	5	36	16	94	23
	Indonesia	12	32	16	12	8	8	68	25

Catatan : \*Data Tahun 2014

Untuk mengetahui apakah pendidik PAUD dan PNF sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka dihitung melalui rasio peserta didik per pendidik (R-PD/P). Standar yang digunakan untuk menghitung apakah terjadi

kelebihan/kekurangan pendidik dapat dilihat pada Tabel 3.2. Dengan menggunakan standar tersebut maka bila R-PD/P lebih kecil daripada standar yang ada maka terjadi kelebihan pendidik, sebaliknya, bila R-PD/P lebih besar daripada standar yang ada maka terjadi kekurangan pendidik. Namun, kekurangan/kelebihan SDM PNF menggunakan indikator R-PD/P tidak dapat diketahui kuantitasnya karena keterbatasan data yang dimiliki.

Berdasarkan Tabel 4.6 disajikan R-PD/P tiap program dan provinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa pada tingkat nasional rata-rata pendidik melayani peserta didik sebesar 25 orang dan program kursus terbesar sebesar 40 orang dan terkecil program paket C sebesar 8. Bila dilihat setiap provinsi maka pendidik program PNF di Provinsi Sulawesi Utara melayani peserta didik yang terbesar sebesar 54 orang berarti terjadi kekurangan pendidik dan terkecil terjadi di DI Yogyakarta sebesar 15 orang berarti terjadi kelebihan pendidik, bila digunakan standar nasional sebesar 25.

Pendidik program PAUD melayani peserta didik sebesar 32 orang, terbesar terjadi di Provinsi Papua sebesar 146 orang dan terkecil terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 14 orang. Pendidik TK melayani peserta didik sebesar 16 orang, terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 62 dan terkecil di di Kalimantan Selatan sebesar 10 orang. Pendidik program Paket A melayani peserta didik sebesar 12 orang, terbesar terjadi di Provinsi Maluku sebesar 19 orang, sedangkan terkecil terjadi di provinsi Bali sebesar 3 orang. Pendidik program Paket B melayani peserta didik sebesar 8 orang, terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 36 orang, sedangkan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 5 orang. Pendidik program Paket C melayani peserta didik sebesar 8 orang, terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 16 orang dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 5 orang. Pendidik program kursus melayani peserta didik sebesar 68 orang, terbesar terjadi di Provinsi Maluku sebesar 121 orang, sedangkan terkecil terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 45 orang.

Dengan menggunakan standar yang berbeda untuk masing-masing program maka dapat diketahui program mana yang telah kelebihan atau kekurangan pendidik. Tabel 4.7 menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendidik tiap provinsi, namun tidak diketahui berapa kekurangan atau kelebihannya. Pendidikan keaksaraan menggunakan standar 10 maka secara nasional kekurangan pendidik karena nilainya di atas standar. PAUD menggunakan standar 30 yang berarti secara nasional terjadi kekurangan pendidik, masih terdapat 11 provinsi yang masih kelebihan pendidik. TK menggunakan standar 20 maka secara nasional terjadi kelebihan pendidik karena nilainya di bawah standar, namun masih terdapat 10 provinsi yang masih kekurangan pendidik. Paket A menggunakan standar 20 maka semua provinsi kelebihan pendidik karena nilainya lebih kecil dari standar. Paket B

menggunakan standar 15 maka secara nasional terjadi kelebihan pendidik karena nilainya lebih kecil dari standar, namun terdapat 5 provinsi yang masih kekurangan pendidik. Paket C menggunakan standar 8 maka secara nasional terjadi kelebihan pendidik karena nilainya lebih kecil dari standar, namun masih terdapat 19 provinsi yang masih kekurangan pendidik. Kursus menggunakan standar 40 karena nilainya lebih besar dari standar maka semua provinsi kekurangan pendidik.

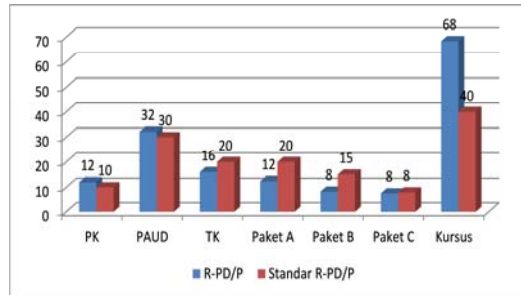
**Tabel 4.7**  
**Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF Berdasarkan Rasio Peserta Didik per Pendidik Menurut Program Tiap Provinsi Tahun 2015**

No.	Provinsi	PK *)	PAUD	TK	Paket A	Paket B	Paket C	Kursus
	Standar	10	30	20	20	15	8	40
1	DKI Jakarta	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan
2	Jawa Barat	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan
3	Banten	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan
4	Jawa Tengah	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan
5	DI Yogyakarta	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan
6	Jawa Timur	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan
7	Aceh	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan
8	Sumatera Utara	Kekurangan	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan
9	Sumatera Barat	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan
10	Riau	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan
11	Kepulauan Riau	Kekurangan	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan
12	Jambi	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan
13	Sumatera Selatan	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan
14	Bangka Belitung	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan
15	Bengkulu	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan
16	Lampung	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan	Kekurangan
17	Kalimantan Barat	Kekurangan	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan
18	Kalimantan Tengah	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan
19	Kalimantan Selatan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan
20	Kalimantan Timur	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan
21	Kalimantan Utara	Kekurangan	Kelebihan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan
22	Sulawesi Utara	Kekurangan	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan
23	Gorontalo	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan	Kekurangan
24	Sulawesi Tengah	Kekurangan	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan
25	Sulawesi Selatan	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan
26	Sulawesi Barat	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan
27	Sulawesi Tenggara	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan	Kekurangan
28	Maluku	Kekurangan	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan
29	Maluku Utara	Kekurangan	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan
30	Bali	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan
31	Nusa Tenggara Barat	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan
32	Nusa Tenggara Timur	Kekurangan	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan
33	Papua	Kekurangan	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan	Kekurangan
34	Papua Barat	Kekurangan	Kelebihan	Kekurangan	Kelebihan	Kekurangan	Kekurangan	Kekurangan
	Indonesia	Kekurangan	Kekurangan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kelebihan	Kekurangan

*Catatan : \*Data Tahun 2014*

Kekurangan/kelebihan pendidik secara nasional dapat dilihat lebih jelas pada Grafik 4.2. Pada Grafik 4.2 menunjukkan perbedaan R-PD/P dengan standar di tiap program PNF. Bila R-PD/P lebih besar daripada standar berarti kekurangan pendidik, sebaliknya R-PD/P lebih kecil daripada standar berarti kelebihan pendidik.

**Grafik 4.2**  
**Perbedaan Rasio Peserta Didik per Pendidik PAUD dan PNF**  
**dengan Standar Menurut Program**  
**Tahun 2015**



### C. Indikator SDM PAUD dan PNF

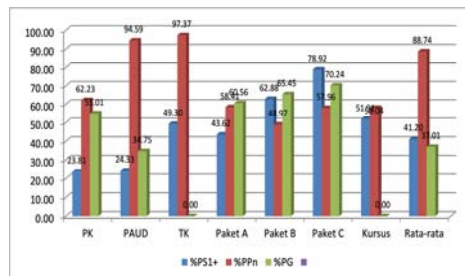
Indikator SDM PAUD dan PNF yang terdiri dari delapan indikator dilihat dari tiap program PAUD dan PNF sebanyak tujuh program, yaitu pendidikan kesetaraan, PAUD, TK, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, dan kursus.

Berdasarkan Tabel 4.8, secara nasional dapat diketahui bahwa R-PD/P terbesar pada program kursus sebesar 68 orang dan terkecil pada paket B setara SMP dan paket C setara SMA sebesar 8 orang. Hal ini berarti pendidik melayani 8 orang sampai 67 orang pada program PNF. %PS1+ terbesar pada program paket C setara SMA sebesar 78,92% dan terkecil pada program Pendidikan Keaksaraan sebesar 23,81%. Hal ini berarti pendidik yang memiliki kelayakan mengajar berkisar antara 23,81% sampai 78,92%. %PPn terbesar pada program TK sebesar 97,37% dan terkecil pada program paket B setara SMP sebesar 48,97%. Hal ini berarti pendidik program TK didominasi oleh perempuan karena hampir 97% adalah perempuan, sedangkan program paket B setara SMP tidak ada separuh. %PG terbesar pada program paket C setara SMA sebesar 70,24% dan terkecil pada program PAUD sebesar 34,75%. Hal ini berarti program paket C setara SMA yang paling sesuai karena pendidik PNF memang diharapkan berasal dari guru. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Grafik 4.3 yang menggambarkan indikator pendidik menurut program.

**Tabel 4.8**  
**Indikator SDM PAUD dan PNF Menurut Program**  
**Tahun 2015**

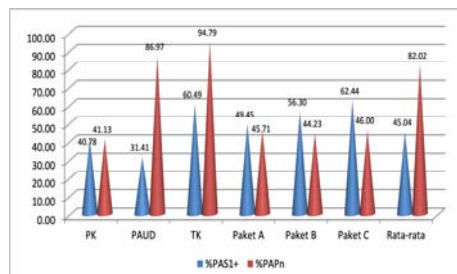
No.	Jenis Program	R-PD/P	%PS1+	%PPn	%PG	%PAS1+	%PAPn
1	Pendidikan Keaksaraan (PK) *	12	23.81	62.23	55.01	40.78	41.13
2	PAUD	32	24.33	94.59	34.75	31.41	86.97
3	Taman Kanak-kanak	16	49.30	97.37	...	60.49	94.79
4	Paket A setara SD	12	43.62	58.41	60.56	49.45	45.71
5	Paket B setara SMP	8	62.88	48.97	65.45	56.30	44.23
6	Paket C setara SMA	8	78.92	57.96	70.24	62.44	46.00
7	Kursus	68	51.91	58.04	...	...	...
	Rata-rata	25	41.20	88.74	37.01	45.04	82.02

**Grafik 4.3**  
**Indikator Pendidik PAUD dan PNF Menurut Program**  
**Tahun 2015 (dalam %)**



Masih pada Tabel 4.8, %PAS1+ terbesar pada program paket C setara SMA sebesar 62,44% dan terkecil pada program PAUD sebesar 31,41%. Hal ini berarti pengelola yang memiliki ijazah tinggi berkisar antara 31,41% sampai 62,44%. %PAPn terbesar pada program PAUD sebesar 94,79% dan terkecil pada program Pendidikan Keaksaraan sebesar 41,13%. Hal ini berarti pengelola program TK didominasi oleh perempuan karena lebih dari 95% adalah perempuan, sedangkan Pendidikan Keaksaraan tidak ada separuh. Grafik 4.4 menggambarkan indikator pengelola menurut program.

**Grafik 4.4**  
**Indikator Pengelola PAUD dan PNF Menurut Program**  
**Tahun 2015 (dalam %)**



## 1. Pendidikan Keaksaraan (PK)

Berdasarkan Tabel 4.9 indikator SDM pendidikan keaksaraan terdiri dari 6 jenis. R-PD/P nasional sebesar 12, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 18 orang dan terkecil adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 11 orang. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka hanya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memerlukan tambahan pendidik. %PS1+ nasional sebesar 23,81%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 50,30% dan terkecil adalah Provinsi Riau sebesar 2,38%.

%PPn nasional sebesar 62,23%, terbesar adalah Provinsi Aceh sebesar 83,33% dan terkecil adalah Provinsi Maluku sebesar 5,39%. %PG nasional sebesar 55,01%, terbesar adalah Provinsi Riau sebesar 79,76% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 21,05%. %PAS1+ nasional sebesar 40,78%, terbesar adalah Provinsi Bali sebesar 67,64% dan terkecil adalah Provinsi Sulawesi Tengah 9,11%. %PAPn nasional sebesar 41,13%, terbesar adalah Provinsi Maluku sebesar 74,44% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Barat 17,76%.

Tabel 4.9  
Indikator SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi  
Tahun 2015

No.	Provinsi	R-PD/P	%PS1+	%PPn	%PG	%PAS1+	%PAPn
1	DKI Jakarta	11	18.64	62.71	50.85	36.00	42.00
2	Jawa Barat	12	14.67	59.83	52.27	33.19	43.78
3	Banten	12	8.53	62.56	57.35	41.18	44.92
4	Jawa Tengah	12	9.31	62.53	67.02	58.80	58.98
5	DI Yogyakarta	12	43.31	35.43	41.73	32.11	49.54
6	Jawa Timur	12	38.04	72.03	57.55	42.79	54.38
7	Aceh	12	33.33	83.33	59.52	40.54	47.30
8	Sumatera Utara	12	49.92	74.87	51.44	47.21	54.72
9	Sumatera Barat	12	16.42	82.09	50.37	26.47	65.97
10	Riau	12	2.38	79.76	79.76	45.45	54.55
11	Kepulauan Riau	12	3.23	79.57	79.57	45.88	54.12
12	Jambi	12	24.10	61.45	56.63	47.30	47.30
13	Sumatera Selatan	12	50.30	74.25	61.08	28.31	44.58
14	Bangka Belitung	12	26.19	73.81	40.48	40.48	54.76
15	Bengkulu	12	7.66	46.89	33.49	34.78	58.94
16	Lampung	12	14.62	71.54	57.31	42.80	57.20
17	Kalimantan Barat	12	5.33	46.94	32.88	33.00	17.76
18	Kalimantan Tengah	12	0.00	49.12	21.05	14.16	45.13
19	Kalimantan Selatan	12	27.97	55.17	52.11	40.79	61.40
20	Kalimantan Timur	12	13.16	72.81	62.28	29.41	38.24
21	Kalimantan Utara	12	14.06	71.88	62.50	26.61	70.97
22	Sulawesi Utara	12	11.97	70.42	35.92	26.92	71.15
23	Gorontalo	12	12.61	70.59	36.13	26.92	71.15
24	Sulawesi Tengah	12	0.00	70.45	33.00	9.11	40.22
25	Sulawesi Selatan	12	30.01	65.95	43.08	27.48	50.39
26	Sulawesi Barat	12	0.00	66.67	33.33	45.95	55.41
27	Sulawesi Tenggara	12	37.88	65.91	62.12	40.88	38.68
28	Maluku	12	40.66	19.78	59.34	51.11	74.44
29	Maluku Utara	12	26.35	5.39	41.92	17.57	35.14
30	Bali	12	22.35	8.88	57.02	67.64	31.39
31	Nusa Tenggara Barat	18	22.48	61.40	46.67	45.59	40.51
32	Nusa Tenggara Timur	12	22.43	61.51	21.13	32.95	19.60
33	Papua	12	22.29	61.57	69.39	50.70	19.82
34	Papua Barat	12	41.10	48.79	43.41	15.76	29.22
	Indonesia	12	23.81	62.23	55.01	40.78	41.13



## 2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan Tabel 4.10 indikator SDM PAUD terdiri dari enam jenis. R-PD/P nasional sebesar 32, terbesar adalah Provinsi Papua sebesar 146 orang dan terkecil adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 14 orang.

Tabel 4.10  
Indikator SDM PAUD Tiap Provinsi  
Tahun 2015

No.	Provinsi	R-PD/P	%PS1+	%PPn	%PG	%PAS1+	%PAPn
1	DKI Jakarta	73	26.28	97.72	41.85	30.80	96.17
2	Jawa Barat	37	20.64	91.60	32.29	29.79	83.34
3	Banten	35	26.69	93.75	34.18	36.44	88.66
4	Jawa Tengah	21	22.12	97.16	25.05	28.53	90.07
5	DI Yogyakarta	14	25.21	97.72	30.95	33.64	81.67
6	Jawa Timur	22	32.66	95.83	36.15	37.26	93.44
7	Aceh	29	25.98	97.27	44.12	33.59	91.73
8	Sumatera Utara	51	24.13	90.45	28.98	33.14	76.64
9	Sumatera Barat	34	19.43	98.29	34.32	30.64	88.21
10	Riau	43	17.32	97.71	44.45	23.01	94.83
11	Kepulauan Riau	74	13.34	95.55	50.04	17.92	88.44
12	Jambi	30	18.39	96.14	44.17	22.91	93.08
13	Sumatera Selatan	36	22.52	94.04	51.83	26.80	89.25
14	Bangka Belitung	25	15.64	97.14	50.48	20.32	94.11
15	Bengkulu	28	25.91	96.23	66.72	31.40	90.00
16	Lampung	37	21.79	94.70	50.74	28.83	89.70
17	Kalimantan Barat	47	20.00	93.60	33.26	25.88	73.06
18	Kalimantan Tengah	41	27.88	94.07	6.74	30.62	86.78
19	Kalimantan Selatan	25	20.23	96.90	38.10	29.65	92.67
20	Kalimantan Timur	30	21.60	95.27	24.82	28.34	93.31
21	Kalimantan Utara	22	11.82	94.79	24.84	24.17	79.17
22	Sulawesi Utara	59	17.00	91.50	35.23	24.17	79.17
23	Gorontalo	30	15.61	98.91	31.77	22.39	86.50
24	Sulawesi Tengah	41	14.31	95.61	58.09	21.80	92.87
25	Sulawesi Selatan	37	32.49	95.46	16.98	44.77	79.74
26	Sulawesi Barat	27	17.00	93.35	34.18	26.02	68.63
27	Sulawesi Tenggara	33	26.31	96.21	59.42	39.11	89.38
28	Maluku	75	18.50	88.85	87.01	24.88	84.49
29	Maluku Utara	36	16.43	89.75	100.00	30.92	84.54
30	Bali	46	31.35	94.79	36.14	31.46	82.50
31	Nusa Tenggara Barat	23	34.85	87.91	6.91	45.23	70.73
32	Nusa Tenggara Timur	58	13.64	90.63	45.92	21.07	77.17
33	Papua	146	19.63	93.40	77.16	34.24	91.18
34	Papua Barat	27	18.02	80.00	22.92	25.43	75.72
	Indonesia	32	24.33	94.59	34.75	31.41	86.97

%PS1+ nasional sebesar 24,33%, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 34,85% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 11,82%. %PPn nasional sebesar 94,59%, terbesar adalah Provinsi Gorontalo sebesar 98,91% dan terkecil adalah Provinsi Papua sebesar 80,00. %PAS1+ nasional sebesar 26,85%, terbesar adalah Provinsi Bali sebesar 47,72% dan terkecil adalah Provinsi Riau sebesar 7,35%. %PAPn nasional sebesar 87,78%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 93,43% dan terkecil adalah Provinsi Bali sebesar 78,24%.

### 3. Taman Kanak-kanak (TK)

Berdasarkan Tabel 4.11 indikator SDM TK hanya digunakan 6 jenis karena ketersediaan data

Tabel 4.11  
Indikator SDM TK Tiap Provinsi  
Tahun 2015

No.	Provinsi	R-PD/P	%PS1+	%PPn	%PG	%PAS1+	%PAPn
1	DKI Jakarta	16	59.81	97.83	...	75.47	95.69
2	Jawa Barat	14	47.35	97.70	...	73.95	92.55
3	Banten	22	56.87	96.44	...	70.19	92.63
4	Jawa Tengah	16	47.26	97.21	...	57.70	95.93
5	DI Yogyakarta	12	64.55	96.50	...	69.99	96.58
6	Jawa Timur	15	58.42	97.96	...	69.40	96.55
7	Aceh	13	32.25	98.92	...	48.03	97.89
8	Sumatera Utara	34	59.09	99.23	...	60.07	86.01
9	Sumatera Barat	13	44.59	97.51	...	48.32	97.20
10	Riau	16	33.53	97.10	...	42.46	96.23
11	Kepulauan Riau	21	24.13	95.68	...	45.97	94.30
12	Jambi	13	33.91	97.16	...	45.42	93.61
13	Sumatera Selatan	12	36.87	97.70	...	54.29	89.44
14	Bangka Belitung	19	37.02	93.91	...	62.43	89.60
15	Bengkulu	12	53.77	97.53	...	56.96	95.15
16	Lampung	13	46.76	98.04	...	54.24	91.48
17	Kalimantan Barat	20	42.42	96.49	...	54.86	89.74
18	Kalimantan Tengah	16	41.26	98.26	...	49.06	96.31
19	Kalimantan Selatan	10	46.32	91.91	...	47.23	96.53
20	Kalimantan Timur	13	52.64	94.42	...	56.11	95.69
21	Kalimantan Utara	22	24.32	96.98	...	38.29	98.11
22	Sulawesi Utara	62	29.15	96.82	...	38.29	98.11
23	Gorontalo	17	40.40	99.02	...	59.74	98.54
24	Sulawesi Tengah	20	24.38	98.61	...	38.97	97.67
25	Sulawesi Selatan	17	59.52	98.77	...	70.81	96.76
26	Sulawesi Barat	20	26.88	97.17	...	51.18	93.49
27	Sulawesi Tenggara	19	30.65	99.07	...	45.26	98.55
28	Maluku	40	16.29	98.77	...	37.85	96.77
29	Maluku Utara	22	26.32	99.14	...	40.91	96.90
30	Bali	16	57.36	96.33	...	69.99	91.46
31	Nusa Tenggara Barat	17	55.05	95.99	...	67.85	84.20
32	Nusa Tenggara Timur	36	25.95	96.07	...	31.43	87.82
33	Papua	34	27.18	96.56	...	47.06	86.00
34	Papua Barat	29	33.76	98.52	...	42.90	97.22
	Indonesia	16	49.30	97.37	...	60.49	94.79

R-PD/P nasional sebesar 16, terbesar adalah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 62 orang dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 10 orang. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka ada 16 provinsi yang telah kelebihan pendidik dan sisanya 17 provinsi masih kekurangan pendidik.

%PS1+ nasional sebesar 44,930%, terbesar adalah Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 64,55% dan terkecil adalah Provinsi Maluku sebesar 16,29%. %PPn nasional sebesar 97,37%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 99,23% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Selatan

sebesar 91,91%. %PAS1+ nasional sebesar 60,49%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 75,47% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 31,43%. %PAPn nasional sebesar 94,79%, terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 98,55% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 84,20%.

#### 4. Paket A Setara SD

Berdasarkan Tabel 4.12 indikator SDM paket A setara SD juga hanya digunakan 6 jenis. R-PD/P nasional sebesar 12, terbesar adalah Provinsi Maluku sebesar 19 orang dan terkecil provinsi Bali sebesar 3 orang. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka 11 provinsi yang telah kelebihan pendidik dan sisanya 22 provinsi masih kekurangan pendidik. %PS1+ nasional sebesar 43,62%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 79,17% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 25,00%, sedangkan Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara tidak ada pendikinya yang lulusan S1. %PPn nasional sebesar 58,41%, terbesar adalah ada 3 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Maluku sebesar 100% dan terkecil adalah Provinsi Papua Barat sebesar 28,57%. %PG nasional sebesar 60,65%, terbesar atau sudah maksimal adalah Provinsi Papua Barat sebesar 100,00% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 22,73%. %PAS1+ nasional sebesar 49,45%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 76,47% dan terkecil adalah Provinsi Papua Barat sebesar 7,69%. %PAPn nasional sebesar 45,71%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 65,38% dan terkecil adalah Provinsi Papua Barat sebesar 23,08%.

Tabel 4.12  
Indikator SDM Paket A Setara SD Tiap provinsi  
Tahun 2015

No.	Provinsi	R-PD/P	%PS1+	%PPn	%PG	%PAS1+	%PAPn
1	DKI Jakarta	9	79.17	50.00	33.33	76.47	50.00
2	Jawa Barat	16	54.55	52.27	77.27	62.50	47.22
3	Banten	17	65.22	56.52	78.26	66.00	52.00
4	Jawa Tengah	13	46.67	55.56	80.00	53.03	43.94
5	DI Yogyakarta	12	50.00	50.00	50.00	33.33	50.00
6	Jawa Timur	16	46.15	55.77	38.46	52.38	33.33
7	Aceh	13	56.00	56.00	80.00	38.46	41.03
8	Sumatera Utara	8	57.45	65.96	76.60	58.97	61.54
9	Sumatera Barat	12	45.45	63.64	75.76	40.38	65.38
10	Riau	14	42.86	61.90	80.95	64.71	47.06
11	Kepulauan Riau	11	0.00	42.86	28.57	83.33	33.33
12	Jambi	11	37.50	50.00	62.50	33.33	30.56
13	Sumatera Selatan	14	38.10	52.38	76.19	47.62	42.86
14	Bangka Belitung	15	30.77	46.15	76.92	36.36	50.00
15	Bengkulu	13	33.33	55.56	44.44	35.71	50.00
16	Lampung	14	64.71	52.94	88.24	64.00	40.00
17	Kalimantan Barat	13	31.82	68.18	22.73	42.86	28.57
18	Kalimantan Tengah	11	34.48	48.28	65.52	62.50	33.93
19	Kalimantan Selatan	7	36.96	52.17	56.52	46.15	48.72
20	Kalimantan Timur	13	40.00	50.00	62.50	47.37	50.00
21	Kalimantan Utara	14	0.00	100.00	50.00	64.44	55.56
22	Sulawesi Utara	16	41.18	100.00	23.53	64.44	55.56
23	Gorontalo	11	38.46	80.77	65.38	30.77	61.54
24	Sulawesi Tengah	14	31.25	59.38	28.13	42.31	46.15
25	Sulawesi Selatan	10	49.18	73.77	62.30	58.82	47.06
26	Sulawesi Barat	7	45.83	33.33	70.83	30.77	61.54
27	Sulawesi Tenggara	16	36.67	70.00	40.00	38.64	45.45
28	Maluku	19	36.36	100.00	27.27	51.85	59.26
29	Maluku Utara	16	30.00	50.00	10.00	50.88	33.33
30	Bali	3	44.44	16.67	72.22	66.67	50.00
31	Nusa Tenggara Barat	17	40.00	86.67	66.67	36.96	39.13
32	Nusa Tenggara Timur	15	25.00	66.67	50.00	24.24	39.39
33	Papua	13	38.64	50.00	86.36	41.89	47.30
34	Papua Barat	5	52.38	28.57	100.00	7.69	23.08
	Indonesia	12	43.62	58.41	60.56	49.45	45.71

## 5. Paket B Setara SMP

Program Paket B Setara SMP berdasarkan Tabel 4.13 indikator SDM paket B setara SMP juga hanya digunakan 6 jenis. R-PD/P nasional sebesar 8 sangat rendah, terbesar adalah Provinsi Papua Barat sebesar 36 orang, sedangkan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 5 orang. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka 14 provinsi telah kelebihan pendidik dan 20 provinsi lainnya masih kekurangan pendidik.

Tabel 4.13  
Indikator SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi  
Tahun 2015

No.	Provinsi	R-PD/P	%PS1+	%PPn	%PG	%PAS1+	%PAPn
1	DKI Jakarta	6	82.19	53.75	77.19	65.33	50.75
2	Jawa Barat	7	62.77	46.84	78.33	58.64	43.08
3	Banten	10	65.80	53.65	74.48	70.44	47.17
4	Jawa Tengah	6	70.88	44.81	87.67	61.16	36.55
5	DI Yogyakarta	6	64.67	48.00	82.00	50.00	43.18
6	Jawa Timur	7	74.83	44.43	47.65	63.67	41.39
7	Aceh	10	66.03	52.14	85.82	52.68	47.32
8	Sumatera Utara	12	57.80	60.55	85.32	63.16	65.79
9	Sumatera Barat	15	70.00	70.00	85.00	53.33	66.67
10	Riau	12	58.54	53.66	76.83	67.86	46.43
11	Kepulauan Riau	10	19.46	58.87	56.16	73.33	19.05
12	Jambi	12	64.18	52.24	80.60	61.54	42.31
13	Sumatera Selatan	13	67.11	69.42	84.79	50.22	64.00
14	Bangka Belitung	14	34.93	49.32	83.56	48.57	48.57
15	Bengkulu	15	50.35	51.06	56.34	45.38	50.42
16	Lampung	17	48.18	53.04	82.19	52.54	44.92
17	Kalimantan Barat	9	24.50	27.67	40.63	36.17	32.98
18	Kalimantan Tengah	8	46.74	51.02	76.91	46.18	49.45
19	Kalimantan Selatan	6	71.65	53.59	73.56	61.47	50.59
20	Kalimantan Timur	6	56.64	51.88	76.44	56.11	45.56
21	Kalimantan Utara	5	57.21	61.54	76.74	64.44	57.78
22	Sulawesi Utara	7	60.99	64.84	74.73	64.44	57.78
23	Gorontalo	19	54.14	68.42	78.20	40.00	73.33
24	Sulawesi Tengah	7	43.75	46.76	33.80	38.89	36.87
25	Sulawesi Selatan	7	67.80	57.70	31.49	60.42	52.08
26	Sulawesi Barat	9	69.61	50.34	85.03	52.70	35.14
27	Sulawesi Tenggara	18	67.84	46.20	43.57	52.59	44.81
28	Maluku	10	49.48	58.48	51.90	25.81	62.90
29	Maluku Utara	7	47.20	44.73	22.64	32.09	45.71
30	Bali	8	63.50	44.89	79.20	73.50	49.57
31	Nusa Tenggara Barat	10	65.40	43.17	73.65	52.10	40.72
32	Nusa Tenggara Timur	10	56.40	40.80	83.20	60.26	24.36
33	Papua	19	50.26	46.60	62.83	61.05	36.84
34	Papua Barat	36	51.28	46.15	61.54	57.89	36.84
	Indonesia	8	62.88	48.97	65.45	56.30	44.23

%PS1+ nasional sebesar 62,88%, terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 82,19% dan terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 19,46%. %PPn nasional sebesar 48,97%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 70,00% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 27,67%. %PG nasional sebesar 64,45%, terbesar adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar 87,67% dan terkecil adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 22,64%. %PAS1+ nasional sebesar 56,30%, terbesar adalah Provinsi Bali sebesar 73,50% dan terkecil adalah Provinsi Maluku sebesar 25,81%. %PAPn nasional sebesar 44,23%, terbesar adalah Provinsi Gorontalo sebesar 73,33% dan terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 19,05%.

## 6. Paket C Setara SMA

Berdasarkan Tabel 4.14 indikator SDM paket C setara SMA juga hanya digunakan 6 jenis. R-PD/P nasional sebesar 8 sangat rendah. Bila nasional dijadikan standar kecukupan pendidik maka 18 provinsi telah kelebihan pendidik dan 16 provinsi lainnya masih kekurangan pendidik.

Tabel 4.14  
Indikator SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi  
Tahun 2015

No.	Provinsi	R-PD/P	%PS1+	%PPn	%PG	%PAS1+	%PAPn
1	DKI Jakarta	6	82.36	60.14	78.03	62.70	60.34
2	Jawa Barat	6	70.32	58.35	77.52	56.86	42.10
3	Banten	7	73.02	60.00	80.40	69.58	48.75
4	Jawa Tengah	6	88.78	57.33	88.08	69.06	41.02
5	DI Yogyakarta	6	85.31	58.53	82.29	49.57	45.22
6	Jawa Timur	6	87.34	56.09	45.66	67.98	41.29
7	Aceh	9	67.09	62.42	90.66	57.61	51.09
8	Sumatera Utara	10	76.65	66.67	95.37	70.56	63.55
9	Sumatera Barat	11	90.05	73.76	89.14	67.05	56.82
10	Riau	12	74.15	63.78	88.32	61.56	53.49
11	Kepulauan Riau	9	18.43	61.65	91.74	61.65	21.80
12	Jambi	11	75.89	62.85	80.24	63.10	42.86
13	Sumatera Selatan	12	68.40	62.99	72.73	51.59	44.59
14	Bangka Belitung	12	61.15	55.40	62.59	48.25	49.65
15	Bengkulu	12	61.81	62.39	50.44	46.79	55.13
16	Lampung	11	72.94	63.53	84.71	73.89	52.87
17	Kalimantan Barat	9	52.57	54.59	41.83	51.30	41.56
18	Kalimantan Tengah	7	67.09	55.27	78.48	58.65	36.54
19	Kalimantan Selatan	6	85.94	61.58	76.71	73.91	51.21
20	Kalimantan Timur	6	82.57	59.87	81.58	59.80	51.96
21	Kalimantan Utara	5	82.14	4.04	82.14	68.97	66.01
22	Sulawesi Utara	6	73.63	67.70	72.45	68.97	66.01
23	Gorontalo	12	75.49	69.61	82.35	53.09	60.49
24	Sulawesi Tengah	7	83.48	56.41	41.31	63.58	46.30
25	Sulawesi Selatan	7	86.00	60.69	52.33	73.74	50.51
26	Sulawesi Barat	9	97.81	59.12	95.26	51.35	58.11
27	Sulawesi Tenggara	13	89.14	57.24	35.52	53.60	56.76
28	Maluku	9	57.88	62.45	67.58	51.87	55.14
29	Maluku Utara	6	57.65	55.48	12.12	39.88	44.51
30	Bali	8	93.08	60.06	81.48	84.62	48.72
31	Nusa Tenggara Barat	9	86.86	54.89	73.43	43.18	47.47
32	Nusa Tenggara Timur	9	82.08	52.52	89.62	84.95	26.88
33	Papua	13	67.08	58.00	71.83	40.29	37.43
34	Papua Barat	16	37.60	57.02	76.86	51.61	30.65
	Indonesia	8	78.92	57.96	70.24	62.44	46.00

%PS1+ nasional sebesar 78,92%, terbesar adalah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 97,81% dan terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 18,43%. %PPn nasional sebesar 57,96%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 73,76% dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 4,04%. %PG nasional sebesar 70,24%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 95,37% dan terkecil adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 12,12%. %PAS1+ nasional sebesar 62,44%, terbesar adalah Provinsi Bali sebesar 84,62% dan terkecil adalah Provinsi Papua sebesar 40,29%. %PAPn nasional sebesar 46,00%, terbesar adalah Provinsi Kalimantan Utara dan Sulawesi

Utara sebesar 66,01% dan terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 21,80%.

## 7. Kursus

Berdasarkan Tabel 4.15 indikator SDM kursus hanya digunakan 3 jenis karena keterbatasan data yang ada. R-PD/P nasional sebesar 68, terbesar adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 121 orang, diikuti Provinsi Kalimantan Utara sebesar 109 orang dan terkecil adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 45 orang. Bila nasional menjadi standar kecukupan pendidik kursus maka terdapat 9 provinsi yang telah kelebihan pendidik.

Tabel 4.15  
Indikator SDM Kursus Tiap Provinsi  
Tahun 2015

No.	Provinsi	R-PD/P	%PS1+	%PPn
1	DKI Jakarta	89	64.09	61.61
2	Jawa Barat	63	53.49	58.21
3	Banten	70	48.63	64.23
4	Jawa Tengah	61	47.08	56.84
5	DI Yogyakarta	45	63.53	52.82
6	Jawa Timur	64	56.44	59.52
7	Aceh	90	54.09	56.47
8	Sumatera Utara	83	40.90	65.22
9	Sumatera Barat	74	70.26	65.37
10	Riau	59	47.17	57.08
11	Kepulauan Riau	86	51.16	58.72
12	Jambi	78	50.68	59.97
13	Sumatera Selatan	73	58.00	58.77
14	Bangka Belitung	71	51.15	52.79
15	Bengkulu	88	46.85	55.00
16	Lampung	72	48.17	57.94
17	Kalimantan Barat	68	47.56	50.00
18	Kalimantan Tengah	50	49.68	56.45
19	Kalimantan Selatan	62	54.86	52.87
20	Kalimantan Timur	53	44.67	59.35
21	Kalimantan Utara	109	46.51	65.12
22	Sulawesi Utara	93	53.51	64.14
23	Gorontalo	89	50.25	48.24
24	Sulawesi Tengah	62	37.80	52.54
25	Sulawesi Selatan	69	51.88	56.86
26	Sulawesi Barat	58	41.63	49.77
27	Sulawesi Tenggara	72	48.30	47.09
28	Maluku	73	46.30	43.98
29	Maluku Utara	121	51.46	41.26
30	Bali	70	58.19	56.61
31	Nusa Tenggara Barat	70	47.28	47.54
32	Nusa Tenggara Timur	79	33.43	64.24
33	Papua	72	49.50	35.64
34	Papua Barat	94	68.18	60.61
	Indonesia	68	51.91	58.04

%PS1+ nasional sebesar 51,91%, terbesar adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 70,26% dan terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 33,43%. %PPn nasional sebesar 58,04%, terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 64,24% dan terkecil adalah Provinsi Papua sebesar 35,64%.

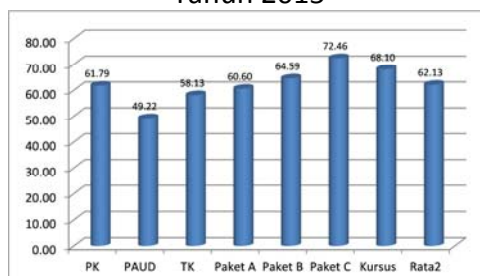
#### D. Kinerja SDM PAUD dan PNF

Kinerja SDM PAUD dan PNF dihitung dari tiga sampai enam indikator dilihat dari tiap program PAUD dan PNF, yaitu pendidikan keaksaraan, PAUD, TK, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, dan kursus. Pendidikan keaksaraan menggunakan 6 indikator TK dan PAUD menggunakan 5 jenis indikator, walaupun ada yang berbeda jenisnya. paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA menggunakan 6 jenis indikator yang sama, sedangkan kursus hanya 3 jenis indikator. Oleh karena itu, untuk menghitung kinerjanya hanya digunakan jenis indikator yang dimiliki oleh masing-masing program.

Tabel 4.16  
Kinerja SDM PAUD dan PNF Menurut Program  
Tahun 2015

No.	Jenis Program	R-PD/P	%PS1+	%PPn	%PG	%PAS1+	%PAPn	Rata2	Jenis
1	Pendidikan Keaksaraan (PK) *)	81.60	42.04	70.77	51.71	69.73	78.31	66.10	PRATAMA
2	PAUD	73.54	43.22	53.18	41.35	58.54	58.73	54.76	KURANG
3	Taman Kanak-kanak	74.55	41.06	51.45	...	53.61	53.21	54.78	KURANG
4	Paket A setara SD	62.78	41.19	80.50	59.04	48.70	84.22	62.74	PRATAMA
5	Paket B setara SMP	62.34	57.71	88.40	69.12	55.12	82.94	69.27	PRATAMA
6	Paket C setara SMA	59.53	73.88	81.22	72.67	60.33	85.08	72.12	MADYA
7	Kursus	56.09	50.96	86.69	...	...	...	64.58	PRATAMA
	Rata-rata	67.20	50.01	73.17	58.78	57.67	73.75	63.48	PRATAMA
	Jenis kategori	PRATAMA	KURANG	MADYA	KURANG	KURANG	MADYA	PRATAMA	

Grafik 4.5  
Kinerja SDM PAUD dan PNF Menurut Jenis Program  
Tahun 2015





Berdasarkan Tabel 4.16 dan Grafik 4.5 diketahui kinerja SDM berdasarkan 6 jenis indikator yang terkait dengan SDM, namun tidak semua program memiliki 6 jenis indikator tersebut. Indikator R-PD/P terbaik pada program pendidikan keaksaraan sebesar 81,60 dan terkecil pada program Kursus sebesar 56,09 sehingga rata-rata menjadi 67,20 termasuk kategori pratama. Indikator %PS1+ terbaik pada program paket C setara SMA sebesar 73,88 dan terkecil pada program TK sebesar 41,06 sehingga rata-rata menjadi 50,01 termasuk kategori kurang. Indikator %PPn terbaik pada program kursus sebesar 86,69 dan terkecil pada program TK sebesar 51,45 sehingga rata-rata menjadi 73,17 termasuk kategori madya. Indikator %PG hanya terdapat pada 5 program dan terbaik pada program paket C setara SMA sebesar 72,67 dan terkecil pada program PAUD sebesar 41,35, sehingga rata-rata menjadi 58,78 termasuk kategori kurang. Indikator %PAS1+ terbaik pada program pendidikan Keaksaraan sebesar 69,73 dan terkecil pada program Paket A Setara SD sebesar 48,70 sehingga rata-rata sebesar 57,67 termasuk kategori kurang. Indikator %PAPn terbaik pada program paket C setara SMA sebesar 89,46 dan terkecil pada program TK sebesar 53,21 sehingga rata-rata sebesar 73,75 termasuk kategori madya.

Program pendidikan keaksaraan terbaik pada indikator %PAPn sebesar 78,31 dan terkecil pada %PS1+ sebesar 42,04 sehingga nilai rata-rata menjadi 66,10 termasuk kategori pratama. Program PAUD terbaik pada indikator R-PD/P sebesar 73,54 dan terkecil pada %PG sebesar 41,35 sehingga nilai rata-rata menjadi 54,76 termasuk kategori kurang. Program TK terbaik pada indikator R-PD/P sebesar 74,55 dan terkecil %PS1+ sebesar 41,06 sehingga nilai rata-rata menjadi 54,78 termasuk kategori kurang. Program paket A setara SD terbaik pada indikator %PAPn sebesar 84,22 dan terkecil pada %PS1+ sebesar 41,19 sehingga rata-rata menjadi 62,74 termasuk kategori pratama. Program paket B setara SMP terbaik pada indikator %PPn sebesar 84,40 dan terkecil pada %PAS1+ sebesar 55,12 sehingga rata-rata menjadi 69,27 termasuk kategori pratama. Program paket C setara SMA terbaik pada indikator %PAPn sebesar 85,08 dan terkecil pada R-PD/P sebesar 59,53 sehingga rata-rata menjadi 72,12 termasuk kategori pratama. Program kursus terbaik pada indikator %PPn sebesar 86,69 dan terkecil pada %PS1+ sebesar 50,96 sehingga rata-rata menjadi 64,58 termasuk kategori pratama. Secara keseluruhan, semua program PNF yang terbaik pada %PAPn sebesar 73,75 dan terkecil pada %PS1+ sebesar 50,01 sehingga menjadi sebesar 63,48 termasuk kategori pratama.

## 1. Kinerja Pendidikan Keaksaraan

Dengan menggunakan standar yang ditentukan untuk setiap indikator SDM pendidikan keaksaraan dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 10, %PS1+ dan %PPn menggunakan standar 50, %PG menggunakan ideal sebesar 100, dan %PAS1+ dan %PAPn menggunakan standar 50.

Tabel 4.17  
Kinerja SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi  
Tahun 2015

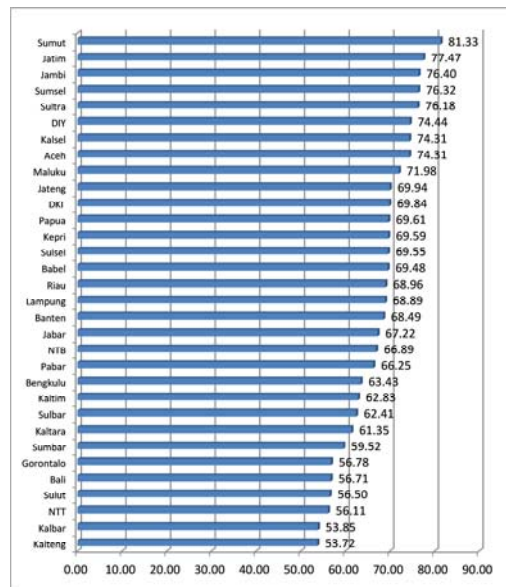
No.	Provinsi	R-PD/P	%PS1+	%PPn	%PG	%PAS1+	%PAPn	Rata2	Jenis Kinerja
	Standar	10.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00		
1	DKI Jakarta	95.16	37.29	79.73	50.85	72.00	84.00	69.84	PRATAMA
2	Jawa Barat	84.20	29.34	83.57	52.27	66.37	87.57	67.22	PRATAMA
3	Banten	84.40	17.06	79.92	57.35	82.35	89.84	68.49	PRATAMA
4	Jawa Tengah	84.22	18.63	79.96	67.02	85.04	84.78	69.94	PRATAMA
5	DI Yogyakarta	84.11	86.61	70.87	41.73	64.22	99.08	74.44	MADYA
6	Jawa Timur	84.21	76.09	69.42	57.55	85.59	91.95	77.47	MADYA
7	Aceh	84.00	66.67	60.00	59.52	81.08	94.59	74.31	MADYA
8	Sumatera Utara	84.14	99.83	66.78	51.44	94.41	91.37	81.33	UTAMA
9	Sumatera Barat	84.28	32.84	60.91	50.37	52.94	75.80	59.52	KURANG
10	Riau	84.00	4.76	62.69	79.76	90.91	91.67	68.96	PRATAMA
11	Kepulauan Riau	84.55	6.45	62.84	79.57	91.76	92.39	69.59	PRATAMA
12	Jambi	83.00	48.19	81.37	56.63	94.59	94.59	76.40	MADYA
13	Sumatera Selatan	84.34	99.40	67.34	61.08	56.63	89.16	76.32	MADYA
14	Bangka Belitung	84.00	52.38	67.74	40.48	80.95	91.30	69.48	PRATAMA
15	Bengkulu	83.60	15.31	93.78	33.49	69.57	84.84	63.43	PRATAMA
16	Lampung	83.87	29.23	69.89	57.31	85.60	87.41	68.89	PRATAMA
17	Kalimantan Barat	84.16	10.66	93.88	32.88	65.99	35.52	53.85	KURANG
18	Kalimantan Tengah	84.44	0.00	98.25	21.05	28.32	90.27	53.72	KURANG
19	Kalimantan Selatan	84.19	55.94	90.63	52.11	81.58	81.43	74.31	MADYA
20	Kalimantan Timur	84.44	26.32	68.67	62.28	58.82	76.47	62.83	PRATAMA
21	Kalimantan Utara	84.21	28.13	69.57	62.50	53.23	70.45	61.35	PRATAMA
22	Sulawesi Utara	84.02	23.94	71.00	35.92	53.85	70.27	56.50	KURANG
23	Gorontalo	84.40	25.21	70.83	36.13	53.85	70.27	56.78	KURANG
24	Sulawesi Tengah	84.30	0.00	70.98	33.00	18.22	80.44	47.82	KURANG
25	Sulawesi Selatan	84.21	60.02	75.81	43.08	54.95	99.23	69.55	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	84.00	0.00	75.00	33.33	91.89	90.24	62.41	PRATAMA
27	Sulawesi Tenggara	84.21	75.76	75.86	62.12	81.76	77.36	76.18	MADYA
28	Maluku	86.67	81.32	39.56	59.34	97.83	67.16	71.98	MADYA
29	Maluku Utara	83.50	52.69	10.78	41.92	35.14	70.27	49.05	KURANG
30	Bali	84.10	44.70	17.77	57.02	73.92	62.78	56.71	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	56.09	44.96	81.44	46.67	91.19	81.02	66.89	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	84.27	44.86	81.29	21.13	65.90	39.21	56.11	KURANG
33	Papua	84.23	44.59	81.21	69.39	98.62	39.63	69.61	PRATAMA
34	Papua Barat	84.34	82.20	97.58	43.41	31.51	58.45	66.25	PRATAMA
	Indonesia	81.60	42.04	70.77	51.71	69.73	78.31	66.10	PRATAMA
	Jenis Kinerja	UTAMA	KURANG	MADYA	KURANG	PRATAMA	MADYA	PRATAMA	

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM pendidikan keaksaraan antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 6 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada R-PD/P sebesar 81,60 termasuk kategori utama dan terkecil pada %PS1+ sebesar 42,04 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM pendidikan keaksaraan sebesar 66,10 termasuk kategori pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka terdapat 8 provinsi yang termasuk madya, 17 provinsi termasuk pratama dan 9 provinsi termasuk kurang, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan

Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur.

Grafik 4.6 menggambarkan kinerja SDM pendidikan keaksaraan tiap provinsi di mana Provinsi Sumatera Utara memiliki kinerja terbaik sebesar 81,33 sedangkan Provinsi Maluku Utara memiliki kinerja terburuk sebesar 49,05 dan terdapat 6 provinsi dalam kondisi kurang.

Grafik 4.6  
Kinerja SDM Pendidikan Keaksaraan Tiap Provinsi  
Tahun 2015



## 2. Kinerja PAUD

Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk setiap indikator SDM PAUD maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 30, %PS1+ dan %PPn menggunakan standar 50, sedangkan %PAS1+ dan %PAPn menggunakan standar 50.

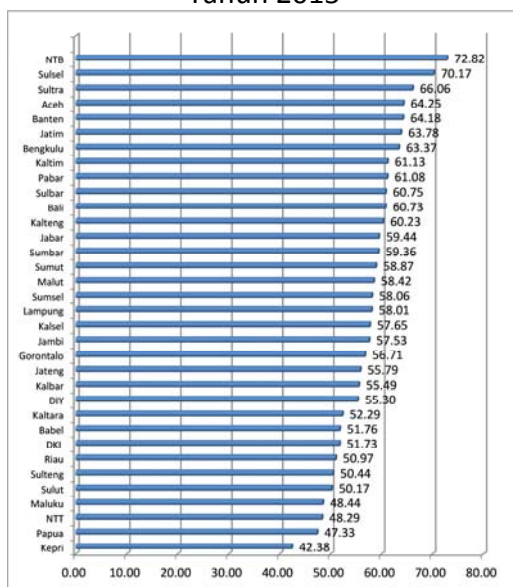
Berdasarkan Tabel 4.18 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM PAUD antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 6 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada R-PD/P sebesar 73,54 termasuk kategori madya dan terkecil pada %PG sebesar 34,75 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM PAUD sebesar 54,17 juga termasuk kategori kurang. Hal yang sama bila dilihat setiap provinsi hampir semuanya dalam kondisi kurang.

Grafik 4.7 menggambarkan kinerja SDM PAUD tiap provinsi di mana Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kinerja terbaik sebesar 72,82 sedangkan Provinsi Maluku Utara memiliki kinerja terburuk sebesar 55,35. Kondisi SDM PAUD ternyata sangat rendah karena yang terbaik pun masih kurang dari 60. Dengan demikian, semua provinsi dalam kondisi kurang.

Tabel 4.18  
Kinerja SDM PAUD Tiap Provinsi  
Tahun 2015

No.	Provinsi	R-PD/P	%PS1+	%PPn	%PG	%PAS1+	%PAPn	Rata2	Jenis Kinerja
	Standar	30	50	50	100	50	50		
1	DKI Jakarta	41.32	52.55	51.17	41.85	61.59	51.99	50.08	KURANG
2	Jawa Barat	81.76	41.28	54.58	32.29	59.57	60.00	54.91	KURANG
3	Banten	84.90	53.38	53.34	34.18	72.88	56.39	59.18	KURANG
4	Jawa Tengah	70.71	44.24	51.46	25.05	57.05	55.51	50.67	KURANG
5	DI Yogyakarta	46.44	50.41	51.17	30.95	67.28	61.22	51.24	KURANG
6	Jawa Timur	73.36	65.32	52.17	36.15	74.52	53.51	59.17	KURANG
7	Aceh	96.18	51.96	51.40	44.12	67.17	54.51	60.89	PRATAMA
8	Sumatera Utara	59.27	48.27	55.28	28.98	66.29	65.24	53.89	KURANG
9	Sumatera Barat	89.10	38.87	50.87	34.32	61.28	56.68	55.19	KURANG
10	Riau	70.31	34.64	51.17	44.45	46.03	52.72	49.89	KURANG
11	Kepulauan Riau	40.51	26.68	52.33	50.04	35.84	56.54	43.66	KURANG
12	Jambi	99.31	36.78	52.01	44.17	45.82	53.72	55.30	KURANG
13	Sumatera Selatan	82.48	45.04	53.17	51.83	53.60	56.02	57.02	KURANG
14	Bangka Belitung	82.25	31.29	51.47	50.48	40.65	53.13	51.55	KURANG
15	Bengkulu	94.70	51.82	51.96	66.72	62.81	55.56	63.93	PRATAMA
16	Lampung	80.30	43.58	52.80	50.74	57.66	55.74	56.80	KURANG
17	Kalimantan Barat	63.86	40.00	53.42	33.26	51.75	68.44	51.79	KURANG
18	Kalimantan Tengah	73.38	55.76	53.15	6.74	61.23	57.61	51.31	KURANG
19	Kalimantan Selatan	82.93	40.47	51.60	38.10	59.29	53.96	54.39	KURANG
20	Kalimantan Timur	99.70	43.21	52.48	24.82	56.69	53.58	55.08	KURANG
21	Kalimantan Utara	73.58	23.64	52.75	24.84	48.33	63.16	47.72	KURANG
22	Sulawesi Utara	50.69	34.00	54.65	35.23	48.33	63.16	47.68	KURANG
23	Gorontalo	99.17	31.23	50.55	31.77	44.79	57.80	52.55	KURANG
24	Sulawesi Tengah	73.86	28.61	52.29	58.09	43.60	53.84	51.72	KURANG
25	Sulawesi Selatan	81.27	64.98	52.38	16.98	89.54	62.71	61.31	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	91.30	34.01	53.56	34.18	52.03	72.85	56.32	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	91.52	52.62	51.97	59.42	78.23	55.94	64.95	PRATAMA
28	Maluku	39.97	37.01	56.28	87.01	49.77	59.18	54.87	KURANG
29	Maluku Utara	82.56	32.85	55.71	100.00	61.85	59.15	65.35	PRATAMA
30	Bali	64.70	62.69	52.75	36.14	62.92	60.60	56.63	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	76.37	69.69	56.88	6.91	90.46	70.69	61.84	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	52.09	27.27	55.17	45.92	42.14	64.79	47.90	KURANG
33	Papua	20.54	39.26	53.53	77.16	68.49	54.84	52.30	KURANG
34	Papua Barat	89.97	36.04	62.50	22.92	50.86	66.04	54.72	KURANG
	Indonesia	73.54	43.22	53.18	41.35	58.54	58.73	54.76	KURANG
	Jenis Kinerja	MADYA	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	

**Grafik 4.7**  
**Kinerja SDM PAUD Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015**



### 3. Kinerja TK

Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk setiap indikator SDM TK maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 20, %PS1+ menggunakan standar ideal 100, %PPn menggunakan standar 50, %PG dan %PAS1 menggunakan ideal sebesar 100, dan %PAPn menggunakan standar 50.

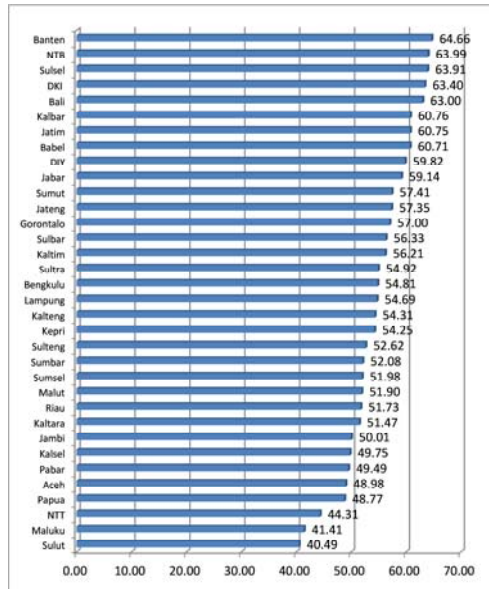
Berdasarkan Tabel 4.19 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM TK antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 5 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada R-PD/P sebesar 74,55 termasuk kategori madya dan terkecil pada %PS1+ sebesar 41,06 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM TK sebesar 54,78 juga termasuk kategori kurang. Hal yang sama bila dilihat setiap provinsi maka hampir semua dalam kondisi kurang.

Tabel 4.19  
Kinerja SDM TK Tiap Provinsi  
Tahun 2015

No.	Provinsi	R-PD/P	%PS1+	%PPn	%PG	%PAS1+	%PAPn	Rata2	Jenis Kinerja
	Standar	20	100	50	100	100	50		
1	DKI Jakarta	78.34	59.81	51.11	...	75.47	52.25	63.40	PRATAMA
2	Jawa Barat	69.21	47.35	51.18	...	73.95	54.03	59.14	KURANG
3	Banten	90.41	56.87	51.84	...	70.19	53.98	64.66	PRATAMA
4	Jawa Tengah	78.22	47.26	51.43	...	57.70	52.12	57.35	KURANG
5	DI Yogyakarta	60.97	64.55	51.82	...	69.99	51.77	59.82	KURANG
6	Jawa Timur	73.11	58.42	51.04	...	69.40	51.78	60.75	PRATAMA
7	Aceh	62.99	32.25	50.54	...	48.03	51.08	48.98	KURANG
8	Sumatera Utara	59.36	59.09	50.39	...	60.07	58.13	57.41	KURANG
9	Sumatera Barat	64.75	44.59	51.28	...	48.32	51.44	52.08	KURANG
10	Riau	79.20	33.53	51.50	...	42.46	51.96	51.73	KURANG
11	Kepulauan Riau	95.86	24.13	52.26	...	45.97	53.02	54.25	KURANG
12	Jambi	65.83	33.91	51.46	...	45.42	53.41	50.01	KURANG
13	Sumatera Selatan	61.64	36.87	51.18	...	54.29	55.90	51.98	KURANG
14	Bangka Belitung	95.06	37.02	53.24	...	62.43	55.81	60.71	PRATAMA
15	Bengkulu	59.49	53.77	51.27	...	56.96	52.55	54.81	KURANG
16	Lampung	66.78	46.76	51.00	...	54.24	54.65	54.69	KURANG
17	Kalimantan Barat	98.97	42.42	51.82	...	54.86	55.72	60.76	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	78.42	41.26	50.88	...	49.06	51.92	54.31	KURANG
19	Kalimantan Selatan	49.02	46.32	54.40	...	47.23	51.80	49.75	KURANG
20	Kalimantan Timur	67.08	52.64	52.96	...	56.11	52.25	56.21	KURANG
21	Kalimantan Utara	92.23	24.32	51.56	...	38.29	50.96	51.47	KURANG
22	Sulawesi Utara	32.38	29.15	51.64	...	38.29	50.96	40.49	KURANG
23	Gorontalo	83.64	40.40	50.50	...	59.74	50.74	57.00	KURANG
24	Sulawesi Tengah	97.88	24.38	50.70	...	38.97	51.20	52.62	KURANG
25	Sulawesi Selatan	86.90	59.52	50.62	...	70.81	51.67	63.91	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	98.64	26.88	51.46	...	51.18	53.48	56.33	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	97.46	30.65	50.47	...	45.26	50.74	54.92	KURANG
28	Maluku	50.60	16.29	50.62	...	37.85	51.67	41.41	KURANG
29	Maluku Utara	90.22	26.32	50.43	...	40.91	51.60	51.90	KURANG
30	Bali	81.09	57.36	51.90	...	69.99	54.67	63.00	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	85.56	55.05	52.09	...	67.85	59.38	63.99	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	55.20	25.95	52.05	...	31.43	56.94	44.31	KURANG
33	Papua	59.67	27.18	51.78	...	47.06	58.14	48.77	KURANG
34	Papua Barat	68.59	33.76	50.75	...	42.90	51.43	49.49	KURANG
	Indonesia	74.55	41.06	51.45	...	53.61	53.21	54.78	KURANG
	Jenis Kinerja	MADYA	KURANG	KURANG	...	KURANG	KURANG	KURANG	

Grafik 4.8 menggambarkan kinerja SDM TK tiap provinsi di mana Provinsi Banten memiliki kinerja terbaik sebesar 64,99 sedangkan Provinsi Sulawesi Utara memiliki kinerja terburuk sebesar 40,49. Kondisi SDM TK ternyata sangat rendah karena yang terbaik pun hanya sekitar 64,99 terjadi di Provinsi Banten dan yang terburuk sebesar 40,49 terdapat di provinsi Sulawesi Utara.

**Grafik 4.8**  
**Kinerja SDM TK Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015**



#### 4. Kinerja Paket A

Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk setiap indikator SDM Paket A setara SD maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 20, %PS1+ menggunakan standar ideal 100, %PPn menggunakan standar 50, %PG dan %PAS1 menggunakan ideal sebesar 100, dan %PAPn menggunakan standar 50.

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM paket A setara SD antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 6 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada %PAPn sebesar 84,22 termasuk kategori utama dan terkecil pada %PS1+ sebesar 41,19 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM paket A setara SD sebesar 62,74 termasuk kategori pratama.

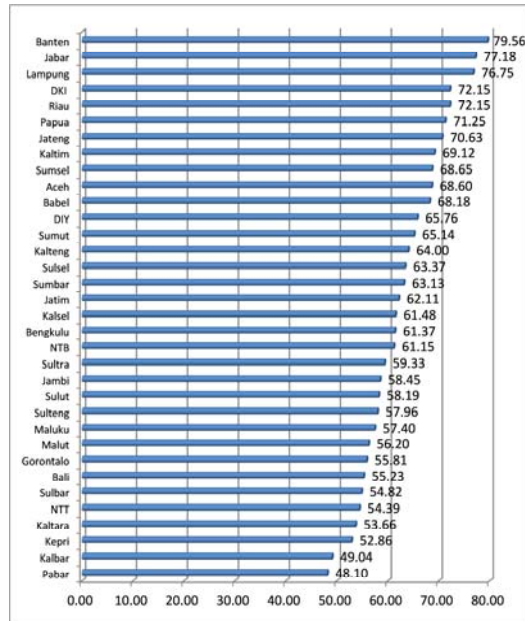
Tabel 4.20  
Kinerja SDM Paket A Setara SD Tiap Provinsi  
Tahun 2015

No.	Provinsi	R-PD/P	%PS1+	%PPn	%PG	%PAS1+	%PAPn	Rata2	Jenis Kinerja
	Standar	20	100	50	100	100	50		
1	DKI Jakarta	43.96	79.17	100.00	33.33	76.47	100.00	72.15	MADYA
2	Jawa Barat	78.64	54.55	95.65	77.27	62.50	94.44	77.18	MADYA
3	Banten	83.26	65.22	88.46	78.26	66.00	96.15	79.56	MADYA
4	Jawa Tengah	66.22	46.67	90.00	80.00	53.03	87.88	70.63	MADYA
5	DI Yogyakarta	61.25	50.00	100.00	50.00	33.33	100.00	65.76	PRATAMA
6	Jawa Timur	79.33	46.15	89.66	38.46	52.38	66.67	62.11	PRATAMA
7	Aceh	65.80	56.00	89.29	80.00	38.46	82.05	68.60	PRATAMA
8	Sumatera Utara	40.74	57.45	75.81	76.60	58.97	81.25	65.14	PRATAMA
9	Sumatera Barat	62.12	45.45	78.57	75.76	40.38	76.47	63.13	PRATAMA
10	Riau	69.52	42.86	80.77	80.95	64.71	94.12	72.15	MADYA
11	Kepulauan Riau	52.86	0.00	85.71	28.57	83.33	66.67	52.86	KURANG
12	Jambi	56.25	37.50	100.00	62.50	33.33	61.11	58.45	KURANG
13	Sumatera Selatan	68.81	38.10	95.45	76.19	47.62	85.71	68.65	PRATAMA
14	Bangka Belitung	72.69	30.77	92.31	76.92	36.36	100.00	68.18	PRATAMA
15	Bengkulu	64.72	33.33	90.00	44.44	35.71	100.00	61.37	PRATAMA
16	Lampung	69.12	64.71	94.44	88.24	64.00	80.00	76.75	MADYA
17	Kalimantan Barat	66.36	31.82	73.33	22.73	42.86	57.14	49.04	KURANG
18	Kalimantan Tengah	57.07	34.48	96.55	65.52	62.50	67.86	64.00	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	35.98	36.96	95.83	56.52	46.15	97.44	61.48	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	64.88	40.00	100.00	62.50	47.37	100.00	69.12	PRATAMA
21	Kalimantan Utara	67.50	0.00	50.00	50.00	64.44	90.00	53.66	KURANG
22	Sulawesi Utara	80.00	41.18	50.00	23.53	64.44	90.00	58.19	KURANG
23	Gorontalo	57.12	38.46	61.90	65.38	30.77	81.25	55.81	KURANG
24	Sulawesi Tengah	69.53	31.25	84.21	28.13	42.31	92.31	57.96	KURANG
25	Sulawesi Selatan	48.03	49.18	67.78	62.30	58.82	94.12	63.37	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	33.54	45.83	66.67	70.83	30.77	81.25	54.82	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	78.33	36.67	71.43	40.00	38.64	90.91	59.33	KURANG
28	Maluku	94.55	36.36	50.00	27.27	51.85	84.38	57.40	KURANG
29	Maluku Utara	79.67	30.00	100.00	10.00	50.88	66.67	56.20	KURANG
30	Bali	14.72	44.44	33.33	72.22	66.67	100.00	55.23	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	87.33	40.00	57.69	66.67	36.96	78.26	61.15	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	73.33	25.00	75.00	50.00	24.24	78.79	54.39	KURANG
33	Papua	66.02	38.64	100.00	86.36	41.89	94.59	71.25	MADYA
34	Papua Barat	25.24	52.38	57.14	100.00	7.69	46.15	48.10	KURANG
	Indonesia	62.78	41.19	80.50	59.04	48.70	84.22	62.74	PRATAMA
	Jenis Kinerja	PRATAMA	KURANG	UTAMA	KURANG	KURANG	UTAMA	PRATAMA	

Grafik 4.9 menggambarkan kinerja SDM paket A setara SD tiap provinsi di mana Provinsi Banten memiliki kinerja terbaik sebesar 79,56 sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki kinerja terburuk sebesar 48,10. Kondisi SDM paket A setara SD ternyata masih rendah karena ada 7 provinsi yang kinerjanya kurang dari 60, yaitu Jambi, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, dan Papua Barat.



**Grafik 4.9**  
**Kinerja SDM Paket A Setara SD Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015**



## 5. Kinerja Paket B

Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk setiap indikator SDM Paket B setara SMP maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 15, %PS1+ menggunakan standar ideal 100, %PPn menggunakan standar 50, %PG dan %PAS1 menggunakan ideal sebesar 100, dan %PAPn menggunakan standar 50.

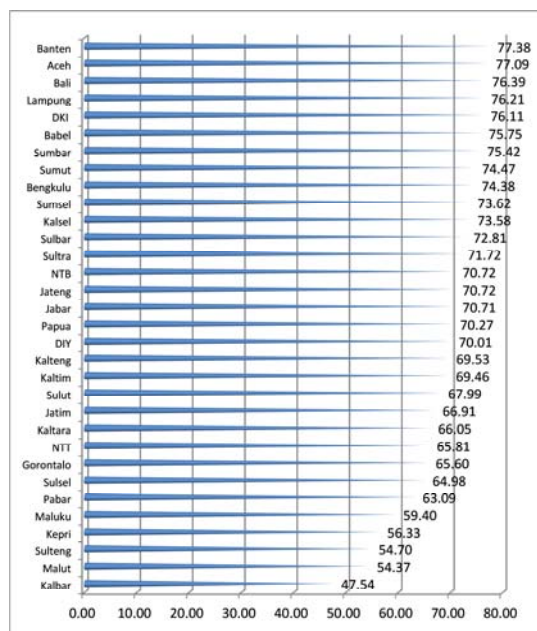
Berdasarkan Tabel 4.21 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM paket B setara SMP antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 6 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada %PPn sebesar 88,40 termasuk kategori utama dan terkecil pada %PAS1+ sebesar 55,12 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM paket B setara SMP sebesar 69,27 termasuk kategori pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka ada 19 provinsi termasuk madya, 10 provinsi termasuk pratama, dan 5 provinsi termasuk kurang, yaitu Maluku, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat.

Tabel 4.21  
Kinerja SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi  
Tahun 2015

No.	Provinsi	R-PD/P	%PS1+	%PPn	%PG	%PAS1+	%PAPn	Rata2	Jenis Kinerja
	Standar	15	100	50	100	100	50		
1	DKI Jakarta	40.40	82.19	93.02	77.19	65.33	98.51	76.11	MADYA
2	Jawa Barat	44.70	62.77	93.68	78.33	58.64	86.16	70.71	MADYA
3	Banten	66.03	65.80	93.20	74.48	70.44	94.34	77.38	MADYA
4	Jawa Tengah	41.89	70.88	89.62	87.67	61.16	73.10	70.72	MADYA
5	DI Yogyakarta	41.02	64.67	96.00	82.00	50.00	86.36	70.01	MADYA
6	Jawa Timur	43.69	74.83	88.86	47.65	63.67	82.79	66.91	PRATAMA
7	Aceh	67.46	66.03	95.89	85.82	52.68	94.63	77.09	MADYA
8	Sumatera Utara	81.96	57.80	82.58	85.32	63.16	76.00	74.47	MADYA
9	Sumatera Barat	97.78	70.00	71.43	85.00	53.33	75.00	75.42	MADYA
10	Riau	82.64	58.54	93.18	76.83	67.86	92.86	78.65	MADYA
11	Kepulauan Riau	66.03	19.46	84.94	56.16	73.33	38.10	56.33	KURANG
12	Jambi	77.71	64.18	95.71	80.60	61.54	84.62	77.39	MADYA
13	Sumatera Selatan	89.47	67.11	72.02	84.79	50.22	78.13	73.62	MADYA
14	Bangka Belitung	91.64	34.93	98.63	83.56	48.57	97.14	75.75	MADYA
15	Bengkulu	97.14	50.35	97.93	56.34	45.38	99.17	74.38	MADYA
16	Lampung	90.23	48.18	94.27	82.19	52.54	89.83	76.21	MADYA
17	Kalimantan Barat	62.65	24.50	55.33	40.63	36.17	65.96	47.54	KURANG
18	Kalimantan Tengah	50.47	46.74	97.99	76.91	46.18	98.91	69.53	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	42.68	71.65	93.30	73.56	61.47	98.84	73.58	MADYA
20	Kalimantan Timur	40.08	56.64	96.38	76.44	56.11	91.11	69.46	PRATAMA
21	Kalimantan Utara	30.14	57.21	81.25	76.74	64.44	86.54	66.05	PRATAMA
22	Sulawesi Utara	44.10	60.99	77.12	74.73	64.44	86.54	67.99	PRATAMA
23	Gorontalo	80.02	54.14	73.08	78.20	40.00	68.18	65.60	PRATAMA
24	Sulawesi Tengah	44.49	43.75	93.52	33.80	38.89	73.74	54.70	KURANG
25	Sulawesi Selatan	47.51	67.80	86.66	31.49	60.42	96.00	64.98	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	59.89	69.61	99.32	85.03	52.70	70.27	72.81	MADYA
27	Sulawesi Tenggara	84.30	67.84	92.40	43.57	52.59	89.63	71.72	MADYA
28	Maluku	64.20	49.48	85.50	51.90	25.81	79.49	59.40	KURANG
29	Maluku Utara	43.42	47.20	89.46	22.64	32.09	91.43	54.37	KURANG
30	Bali	53.21	63.50	89.78	79.20	73.50	99.15	76.39	MADYA
31	Nusa Tenggara Barat	65.40	65.40	86.35	73.65	52.10	81.44	70.72	MADYA
32	Nusa Tenggara Timur	64.67	56.40	81.60	83.20	60.26	48.72	65.81	PRATAMA
33	Papua	80.61	50.26	93.19	62.83	61.05	73.68	70.27	MADYA
34	Papua Barat	41.85	51.28	92.31	61.54	57.89	73.68	63.09	PRATAMA
	Indonesia	62.34	57.71	88.40	69.12	55.12	82.94	69.27	PRATAMA
	Jenis Kinerja	PRATAMA	KURANG	UTAMA	PRATAMA	KURANG	UTAMA	PRATAMA	

Grafik 4.10 menggambarkan kinerja SDM paket B setara SMP tiap provinsi di mana Provinsi Banten memiliki kinerja terbaik sebesar 77,38 sedangkan Provinsi Kalimantan Barat memiliki kinerja terburuk sebesar 47,54. Kondisi SDM paket B setara SMP ternyata masih rendah karena ada 5 provinsi yang kinerjanya kurang dari 60.

**Grafik 4.10**  
**Kinerja SDM Paket B Setara SMP Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015**



## 6. Kinerja Paket C

Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk setiap indikator SDM Paket C setara SMA maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 15, %PS1+ menggunakan standar ideal 100, %PPn menggunakan standar 50, %PG dan %PAS1 menggunakan ideal sebesar 100, dan %PAPn menggunakan standar 50.

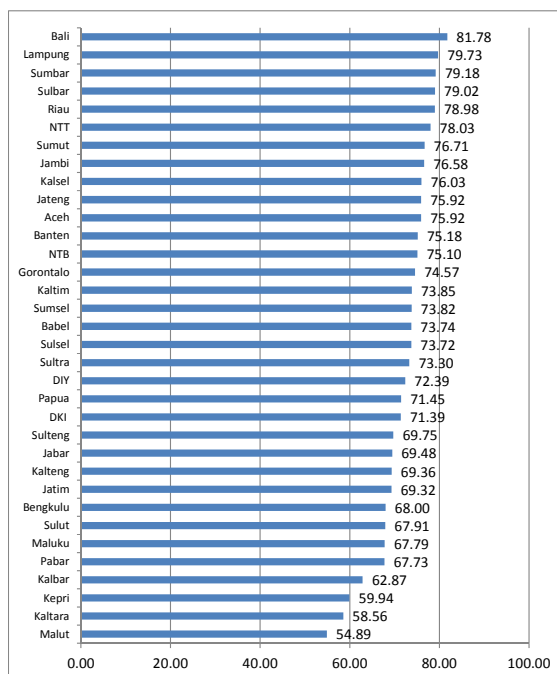
Berdasarkan Tabel 4.22 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM paket C setara SMA antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 6 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada %PAPn sebesar 85,08 termasuk kategori utama dan terkecil pada R-PD/P sebesar 59,53 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM paket B setara SMP sebesar 72,12 termasuk kategori pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka 1 provinsi termasuk utama, 21 provinsi termasuk madya, 9 provinsi termasuk pratama, dan 3 provinsi termasuk kurang, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat.

**Tabel 4.22**  
**Kinerja SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015**

No.	Provinsi	R-PD/P	%PS1+	%PPn	%PG	%PAS1+	%PAPn	Rata2	Jenis Kinerja
	Standar	15	100	50	100	100	50		
1	DKI Jakarta	39.27	82.36	83.13	78.03	62.70	82.86	71.39	MADYA
2	Jawa Barat	42.26	70.32	85.69	77.52	56.86	84.20	69.48	PRATAMA
3	Banten	47.22	73.02	83.33	80.40	69.58	97.50	75.18	MADYA
4	Jawa Tengah	40.33	88.78	87.21	88.08	69.06	82.05	75.92	MADYA
5	DI Yogyakarta	41.32	85.31	85.42	82.29	49.57	90.43	72.39	MADYA
6	Jawa Timur	43.20	87.34	89.14	45.66	67.98	82.58	69.32	PRATAMA
7	Aceh	62.16	67.09	80.10	90.66	57.61	97.87	75.92	MADYA
8	Sumatera Utara	63.98	76.65	75.00	95.37	70.56	78.68	76.71	MADYA
9	Sumatera Barat	73.06	90.05	67.79	89.14	67.05	88.00	79.18	MADYA
10	Riau	77.98	74.15	78.40	88.32	61.56	93.47	78.98	MADYA
11	Kepulauan Riau	63.14	18.43	81.10	91.74	61.65	43.61	59.94	KURANG
12	Jambi	74.99	75.89	79.56	80.24	63.10	85.71	76.58	MADYA
13	Sumatera Selatan	81.63	68.40	79.38	72.73	51.59	89.17	73.82	MADYA
14	Bangka Belitung	80.91	61.15	90.26	62.59	48.25	99.30	73.74	MADYA
15	Bengkulu	78.10	61.81	80.14	50.44	46.79	90.70	68.00	PRATAMA
16	Lampung	73.57	72.94	78.70	84.71	73.89	94.58	79.73	MADYA
17	Kalimantan Barat	56.81	52.57	91.60	41.83	51.30	83.12	62.87	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	48.38	67.09	90.46	78.48	58.65	73.08	69.36	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	40.76	85.94	81.20	76.71	73.91	97.64	76.03	MADYA
20	Kalimantan Timur	39.43	82.57	83.52	81.58	59.80	96.23	73.85	MADYA
21	Kalimantan Utara	34.29	82.14	8.08	82.14	68.97	75.75	58.56	KURANG
22	Sulawesi Utara	42.83	73.63	73.86	72.45	68.97	75.75	67.91	PRATAMA
23	Gorontalo	82.03	75.49	71.83	82.35	53.09	82.65	74.57	MADYA
24	Sulawesi Tengah	48.89	83.48	88.64	41.31	63.58	92.59	69.75	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	48.86	86.00	82.39	52.33	73.74	99.00	73.72	MADYA
26	Sulawesi Barat	59.10	97.81	84.57	95.26	51.35	86.05	79.02	MADYA
27	Sulawesi Tenggara	86.06	89.14	87.35	35.52	53.60	88.10	73.30	MADYA
28	Maluku	58.71	57.88	80.06	67.58	51.87	90.68	67.79	PRATAMA
29	Maluku Utara	40.58	57.65	90.11	12.12	39.88	89.02	54.89	KURANG
30	Bali	50.85	93.08	83.24	81.48	84.62	97.44	81.78	UTAMA
31	Nusa Tenggara Barat	61.11	86.86	91.09	73.43	43.18	94.95	75.10	MADYA
32	Nusa Tenggara Timur	62.56	82.08	95.21	89.62	84.95	53.76	78.03	MADYA
33	Papua	88.46	67.08	86.21	71.83	40.29	74.86	71.45	MADYA
34	Papua Barat	91.32	37.60	87.68	76.86	51.61	61.29	67.73	PRATAMA
	Indonesia	59.53	73.88	81.22	72.67	60.33	85.08	72.12	MADYA
	Jenis Kinerja	KURANG	MADYA	UTAMA	MADYA	PRATAMA	UTAMA	MADYA	

Grafik 4.11 menggambarkan kinerja SDM paket C setara SMA tiap provinsi di mana Provinsi Bali memiliki kinerja terbaik sebesar 81,78 sedangkan Provinsi Maluku Utara memiliki kinerja terburuk sebesar 54,89.

**Grafik 4.11**  
**Kinerja SDM Paket C Setara SMA Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015**



## 7. Kinerja Kursus

Dengan menggunakan standar yang telah ditentukan untuk tiga indikator SDM Kursus maka dapat dihitung kinerja masing-masing provinsi. R-PD/P menggunakan standar 40, %PS1+ menggunakan standar ideal 100, dan %PPn menggunakan standar 50.

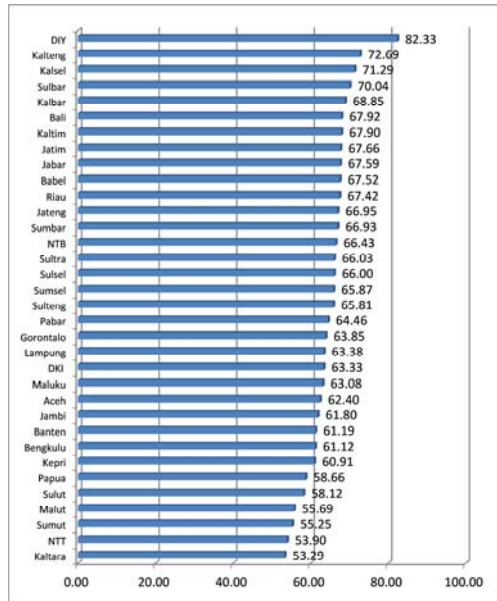
Berdasarkan Tabel 4.23 dapat dilihat perbandingan kinerja SDM kursus antarprovinsi. Secara nasional, dengan menggunakan 3 indikator dapat diketahui kinerja SDM terbaik pada %PPn sebesar 86,69 termasuk kategori utama dan terkecil pada %PS1+ sebesar 50,96 termasuk kategori kurang, sehingga kinerja SDM kursus sebesar 64,58 termasuk kategori pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka Provinsi DI Yogyakarta termasuk utama, 3 provinsi termasuk madya, 24 provinsi termasuk pratama, dan 6 provinsi termasuk kurang, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Tabel 4.23  
Kinerja SDM Kursus Tiap Provinsi  
Tahun 2015

No.	Provinsi	R-PD/P	%PS1+	%PPn	Rata2	Jenis Kinerja
	Standar	40	100	50		
1	DKI Jakarta	44.74	64.09	81.15	63.33	PRATAMA
2	Jawa Barat	63.37	53.49	85.90	67.59	PRATAMA
3	Banten	57.09	48.63	77.85	61.19	PRATAMA
4	Jawa Tengah	65.81	47.08	87.96	66.95	PRATAMA
5	DI Yogyakarta	88.79	63.53	94.67	82.33	UTAMA
6	Jawa Timur	62.55	56.44	84.00	67.66	PRATAMA
7	Aceh	44.55	54.09	88.55	62.40	PRATAMA
8	Sumatera Utara	48.18	40.90	76.67	55.25	KURANG
9	Sumatera Barat	54.05	70.26	76.49	66.93	PRATAMA
10	Riau	67.50	47.17	87.59	67.42	PRATAMA
11	Kepulauan Riau	46.42	51.16	85.15	60.91	PRATAMA
12	Jambi	51.34	50.68	83.38	61.80	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	54.55	58.00	85.07	65.87	PRATAMA
14	Bangka Belitung	56.69	51.15	94.72	67.52	PRATAMA
15	Bengkulu	45.60	46.85	90.91	61.12	PRATAMA
16	Lampung	55.68	48.17	86.29	63.38	PRATAMA
17	Kalimantan Barat	58.99	47.56	100.00	68.85	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	79.81	49.68	88.58	72.69	MADYA
19	Kalimantan Selatan	64.45	54.86	94.57	71.29	MADYA
20	Kalimantan Timur	74.77	44.67	84.25	67.90	PRATAMA
21	Kalimantan Utara	36.58	46.51	76.79	53.29	KURANG
22	Sulawesi Utara	42.90	53.51	77.95	58.12	KURANG
23	Gorontalo	44.81	50.25	96.48	63.85	PRATAMA
24	Sulawesi Tengah	64.46	37.80	95.17	65.81	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	58.19	51.88	87.94	66.00	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	68.94	41.63	99.55	70.04	MADYA
27	Sulawesi Tenggara	55.60	48.30	94.19	66.03	PRATAMA
28	Maluku	54.98	46.30	87.96	63.08	PRATAMA
29	Maluku Utara	33.10	51.46	82.52	55.69	KURANG
30	Bali	57.22	58.19	88.33	67.92	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	56.93	47.28	95.09	66.43	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	50.44	33.43	77.83	53.90	KURANG
33	Papua	55.20	49.50	71.29	58.66	KURANG
34	Papua Barat	42.70	68.18	82.50	64.46	PRATAMA
	Indonesia	56.09	50.96	86.69	64.58	PRATAMA
	Jenis Kinerja	KURANG	KURANG	UTAMA	PRATAMA	

Grafik 4.12 menggambarkan kinerja SDM kursus tiap provinsi di mana Provinsi DI Yogyakarta memiliki kinerja terbaik sebesar 82,33 sedangkan Provinsi Kalimantan Utara memiliki kinerja terburuk sebesar 53,29.

**Grafik 4.12**  
**Kinerja SDM Kursus Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015**



## 8. Kinerja PAUD dan PNF

Dengan menggabungkan nilai ke-6 indikator dan ke-7 program PAUD dan PNF maka dapat dihitung kinerja SDM PAUD dan PNF masing-masing provinsi seperti disajikan pada Tabel 4.24.

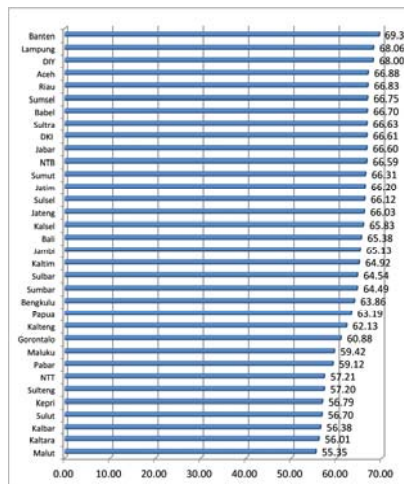
Berdasarkan Tabel 4.24 maka dapat dilihat kinerja SDM PAUD dan PNF dengan rincian terbaik adalah pada %PPn sebesar 78,36 termasuk kategori madya, kemudian %PAS1+ sebesar 72,12 termasuk kategori madya dan terkecil pada %%PS1+ sebesar 54,76 termasuk kurang, sehingga kinerja SDM PAUD dan PNF menjadi 62,51 termasuk kategori pratama.

Tabel 4.24  
Kinerja SDM Semua Program PAUD dan PNF Tiap Provinsi  
Tahun 2015

No.	Provinsi	PK *)	PAUD	TK	Paket A	Paket B	Paket C	Kursus	Rata2	Kinerja
1	DKI Jakarta	69.84	50.08	63.40	72.15	76.11	71.39	63.33	66.61	PRATAMA
2	Jawa Barat	67.22	54.91	59.14	77.18	70.71	69.48	67.59	66.60	PRATAMA
3	Banten	68.49	59.18	64.66	79.56	77.38	75.18	61.19	69.38	PRATAMA
4	Jawa Tengah	69.94	50.67	57.35	70.63	70.72	75.92	66.95	66.03	PRATAMA
5	DI Yogyakarta	74.44	51.24	59.82	65.76	70.01	72.39	82.33	68.00	UTAMA
6	Jawa Timur	77.47	59.17	60.75	62.11	66.91	69.32	67.66	66.20	PRATAMA
7	Aceh	74.31	60.89	48.98	68.60	77.09	75.92	62.40	66.88	PRATAMA
8	Sumatera Utara	81.33	53.89	57.41	65.14	74.47	76.71	55.25	66.31	KURANG
9	Sumatera Barat	59.52	55.19	52.08	63.13	75.42	79.18	66.93	64.49	PRATAMA
10	Riau	68.96	49.89	51.73	72.15	78.65	78.98	67.42	66.83	PRATAMA
11	Kepulauan Riau	69.59	43.66	54.25	52.86	56.33	59.94	60.91	56.79	PRATAMA
12	Jambi	76.40	55.30	50.01	58.45	77.39	76.58	61.80	65.13	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	76.32	57.02	51.98	68.65	73.62	73.82	65.87	66.75	PRATAMA
14	Bangka Belitung	69.48	51.55	60.71	68.18	75.75	73.74	67.52	66.70	PRATAMA
15	Bengkulu	63.43	63.93	54.81	61.37	74.38	68.00	61.12	63.86	PRATAMA
16	Lampung	68.89	56.80	54.69	76.75	76.21	79.73	63.38	68.06	PRATAMA
17	Kalimantan Barat	53.85	51.79	60.76	49.04	47.54	62.87	68.85	56.38	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	53.72	51.31	54.31	64.00	69.53	69.36	72.69	62.13	MADYA
19	Kalimantan Selatan	74.31	54.39	49.75	61.48	73.58	76.03	71.29	65.83	MADYA
20	Kalimantan Timur	62.83	55.08	56.21	69.12	69.46	73.85	67.90	64.92	PRATAMA
21	Kalimantan Utara	61.35	47.72	51.47	53.66	66.05	58.56	53.29	56.01	KURANG
22	Sulawesi Utara	56.50	47.68	40.49	58.19	67.99	67.91	58.12	56.70	KURANG
23	Gorontalo	56.78	52.55	57.00	55.81	65.60	74.57	63.85	60.88	PRATAMA
24	Sulawesi Tengah	47.82	51.72	52.62	57.96	54.70	69.75	65.81	57.20	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	69.55	61.31	63.91	63.37	64.98	73.72	66.00	66.12	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	62.41	56.32	56.33	54.82	72.81	79.02	70.04	64.54	MADYA
27	Sulawesi Tenggara	76.18	64.95	54.92	59.33	71.72	73.30	66.03	66.63	PRATAMA
28	Maluku	71.98	54.87	41.41	57.40	59.40	67.79	63.08	59.42	PRATAMA
29	Maluku Utara	49.05	65.35	51.90	56.20	54.37	54.89	55.69	55.35	KURANG
30	Bali	56.71	56.63	63.00	55.23	76.39	81.78	67.92	65.38	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	66.89	61.84	63.99	61.15	70.72	75.10	66.43	66.59	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	56.11	47.90	44.31	54.39	65.81	78.03	53.90	57.21	KURANG
33	Papua	69.61	52.30	48.77	71.25	70.27	71.45	58.66	63.19	KURANG
34	Papua Barat	66.25	54.72	49.49	48.10	63.09	67.73	64.46	59.12	PRATAMA
	Indonesia	66.10	54.76	54.78	62.74	69.27	72.12	64.58	63.48	PRATAMA
	Jenis Kinerja		PRATAMA	KURANG	KURANG	PRATAMA	PRATAMA	MADYA	PRATAMA	PRATAMA

Grafik 4.13 menggambarkan kinerja SDM semua program PAUD dan PNF tiap provinsi di mana Provinsi Banten memiliki kinerja terbaik sebesar 69,38 sedangkan Provinsi Maluku Utara memiliki kinerja terburuk sebesar 55,35.

Grafik 4.13  
Kinerja SDM Program PAUD dan PNF Tiap Provinsi  
Tahun 2015





## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Sesuai dengan hasil dan bahasan maka dapat disimpulkan tentang empat materi sesuai dengan tujuan, yaitu potensi SDM PAUD dan PNF, kebutuhan dan kekurangan/kelebihan SDM PAUD dan PNF terutama pendidik, analisis indikator pendidikan SDM PAUD dan PNF berdasarkan data dan berdasarkan indikator menurut jenis program PAUD dan PNF, dan kinerja SDM PAUD dan PNF berdasarkan 6 jenis indikator.

**Tabel 5.1**  
**Potensi SDM PAUD dan PNF Menurut Program**  
**Tahun 2015**

No.	Jenis Program	Pendidik (P)	Pengelola (PA)	R-P/PA
1	Pendidikan Keaksaraan (PK) *)	23,215	20,745	1
2	PAUD	238,867	113,185	2
3	Taman Kanak-kanak	281,136	85,499	3
4	Paket A setara SD	933	1,282	1
5	Paket B setara SMP	20,318	8,948	2
6	Paket C setara SMA	32,677	11,646	3
7	Kursus	45,175	...	...
	Jumlah	642,321	241,305	3

Potensi SDM PAUD dan PNF yang terdapat pada Tabel 5.1 untuk tujuh program dilihat dari pendidik sebesar 642.321 ribu orang sudah cukup besar dengan pengelola sebesar 241.305 ribu orang dan setiap pengelola terdapat tiga orang pendidik. Namun, pendidik pada pendidikan keaksaraan dan paket A setara SD hanya 1 orang, berarti pengelola merangkap menjadi pendidik.

**Tabel 5.2**  
**Kebutuhan dan Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF**  
**Tahun 2015**

No.	Jenis Program	Kebutuhan	Yg Ada	Kekurangan/Kelebihan
1	Pendidikan Keaksaraan (PK) *)	27,944	23,215	-4,729
2	PAUD	256,142	238,867	-17,275
3	Taman Kanak-kanak	224,773	281,136	56,363
4	Paket A setara SD	582	933	351
5	Paket B setara SMP	11,272	20,318	9,046
6	Paket C setara SMA	31,218	32,677	1,459
7	Kursus	77,262	45,175	-32,087
	Jumlah	629,193	642,321	13,128

Kebutuhan pendidik program PAUD dan PNF yang terdapat pada Tabel 5.2 untuk tujuh program sebesar 629.193, namun pendidik yang ada sebesar 642.321 ribu orang sehingga terjadi kelebihan guru sebesar 13.128 ribu. Bila dilihat pada setiap program maka pendidikan keaksaraan, PAUD, dan kursus yang masih kekurangan pendidik masing-masing sebesar 4.729, 17.275, dan 32.087 orang, sedangkan lima program lainnya yaitu TK, Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SM telah kelebihan masing-masing sebesar 56.363, 351, 9.046, dan 1.459.

Tabel 5.3  
Kekurangan/Kelebihan Pendidik PAUD dan PNF  
Berdasarkan Rasio Peserta Didik per Pendidik  
Tahun 2015

No.	Jenis Program	R-PD/P	Standar	Kekurangan/Kelebihan
1	Pendidikan Keaksaraan (PK) *	12	10	Kekurangan
2	PAUD	32	30	Kekurangan
3	Taman Kanak-kanak	16	20	Kelebihan
4	Paket A setara SD	12	20	Kelebihan
5	Paket B setara SMP	8	15	Kelebihan
6	Paket C setara SMA	8	8	Kelebihan
7	Kursus	68	40	Kekurangan
	Rata-rata	25		

Kekurangan/kelebihan SDM PAUD dan PNF secara cepat dapat dilihat pada Tabel 5.3. Secara nasional dapat dikatakan masih terjadi kekurangan pendidik di tiga program, yaitu pendidikan keaksaraan, PAUD, dan kursus. Pendidikan keaksaraan yang standarnya 10 ternyata pendidik harus melayani 12 orang, untk PAUD standarnya 30 ternyata harus melayani 32 orang.. Begitu juga kursus, seharusnya hanya menangani 40 orang ternyata pendidik harus melayani 68 orang. Namun, 5 program lainnya justru kelebihan pendidik dan terbesar adalah paket A setara SD.

Tabel 5.4  
Indikator SDM PAUD dan PNF Menurut Program  
Tahun 2015

No.	Jenis Program	R-PD/P	%PS1+	%PPn	%PG	%PAS1+	%PAPn
1	Pendidikan Keaksaraan (PK) *	12	23.81	62.23	55.01	40.78	41.13
2	PAUD	32	24.33	94.59	34.75	31.41	86.97
3	Taman Kanak-kanak	16	49.30	97.37	...	60.49	94.79
4	Paket A setara SD	12	43.62	58.41	60.56	49.45	45.71
5	Paket B setara SMP	8	62.88	48.97	65.45	56.30	44.23
6	Paket C setara SMA	8	78.92	57.96	70.24	62.44	46.00
7	Kursus	68	51.91	58.04	...	...	...
	Rata-rata	25	41.20	88.74	37.01	45.04	82.02

Indikator SDM PAUD dan PNF disajikan pada Tabel 5.4. Secara nasional, dapat diketahui bahwa terdapat 6 indikator berdasarkan pendidik dan pengelola PAUD dan PNF. Indikator pendidik ini terdiri dari 4 jenis. Pertama adalah indikator R-PD/P sebesar 25, artinya pendidik PNF melayani 25 peserta didik, kondisi ini cukup bagus. Kedua, %PS1+ sebesar 41,20% berarti hanya sepertiga dari persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kondisi ini perlu ditingkatkan walaupun bukan guru persekolahan. Ketiga, %PPn sebesar 88,74% berarti perempuan lebih banyak menjadi pendidik di program PNF jika dibandingkan dengan laki-laki. Keempat, %PG sebesar 37,01%, artinya belum ada separuh pendidik yang berasal dari guru yang seharusnya 100%.

Indikator pengelola PAUD dan PNF terdiri dari 2 jenis. Pertama, %PAS1+ sebesar 45,04%, artinya pengelola yang memiliki ijazah S1 dan lebih tinggi ternyata belum ada separuh, sangat kecil, oleh karena itu perlu ditingkatkan kualifikasinya. Kedua, %PAPn sebesar 82,02%, hal ini menunjukkan bahwa pengelola perempuan lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidik perempuan di tujuh program PAUD dan PNF memiliki kondisi yang terbaik jika dibandingkan dengan indikator lainnya, kecuali paket B setara SMP dan paket C setara SMA yang terbaik adalah pendidik dengan ijazah S1 dan lebih tinggi.

Tabel 5.5  
Kinerja SDM PAUD dan PNF Menurut Program  
Tahun 2015

No.	Jenis Program	R-PD/P	%PS1+	%PPn	%PG	%PAS1+	%PAPn	Rata2	Jenis
1	Pendidikan Keaksaraan (PK *)	81.60	42.04	70.77	51.71	69.73	78.31	66.10	MADYA
2	PAUD	73.54	43.22	53.18	41.35	58.54	58.73	54.76	KURANG
3	Taman Kanak-kanak	74.55	41.06	51.45	...	53.61	53.21	54.78	KURANG
4	Paket A setara SD	62.78	41.19	80.50	59.04	48.70	84.22	62.74	UTAMA
5	Paket B setara SMP	62.34	57.71	88.40	69.12	55.12	82.94	69.27	UTAMA
6	Paket C setara SMA	59.53	73.88	81.22	72.67	60.33	85.08	72.12	UTAMA
7	Kursus	56.09	50.96	86.69	...	...	...	64.58	PARIPURNA
	Rata-rata	67.20	50.01	73.17	58.78	57.67	73.75	63.48	MADYA
	Jenis	PRATAMA	KURANG	MADYA	KURANG	KURANG	MADYA	PRATAMA	

Kinerja SDM PAUD dan PNF disajikan pada Tabel 5.5. Secara nasional kinerja SDM PAUD dan PNF sebesar 63,48 termasuk kategori madya. Bila dirinci menurut program, pendidikan keaksaraan yang dihitung dari enam jenis indikator sebesar 66,10 termasuk kategori madya. PAUD yang dihitung dari enam jenis indikator sebesar 54,76 termasuk kategori kurang. TK yang dihitung dari lima jenis indikator sebesar 54,78 termasuk kategori kurang. Paket A setara SD yang dihitung dari enam jenis indikator sebesar 62,74 termasuk kategori utama. Paket B setara SMP yang dihitung dari enam jenis indikator sebesar 69,27 termasuk kategori utama. Paket C setara SMA yang

dihitung dari enam jenis indikator sebesar 72,12 termasuk kategori utama. Kursus yang dihitung dari tiga jenis indikator sebesar 64,58 termasuk kategori paripurna.

Dengan demikian, berdasarkan program PAUD dan PNF dapat dikatakan bahwa program paket C setara SMA yang memiliki SDM yang paling baik dengan nilai 72,12, walaupun masih jauh dari 100 sebagai nilai terbaik. Sebaliknya, program PAUD memiliki SDM yang paling buruk dengan nilai 54,76, tidak ada separuh dari 100 sebagai nilai terbaik.

Sebaliknya, bila dilihat menurut indikator maka R-PD/P dari 7 program sebesar 67,20 termasuk kategori pratama. %PS1+ dari 7 program sebesar 50,01 termasuk kategori kurang. %PPn dari 7 program sebesar 73,17 termasuk kategori kurang. %PG dari 5 program sebesar 58,78 termasuk kategori kurang. %PAS1 dari 6 program sebesar 57,67 termasuk kategori kurang. %PAPn dari 6 program sebesar 73,75 termasuk kategori madya.

Dengan demikian, berdasarkan pada indikator SDM PAUD dan PNF maka pendidik perempuan memiliki nilai terbaik sebesar 73,17 berarti sudah lebih dari tiga per empat nilainya. Sebaliknya, nilai terburuk pada pendidik yang berijazah S1+ dengan nilai 45,31, tidak ada separuh dari 100 sebagai nilai terbaik. Hal yang sama dengan pengelola walaupun hanya dari PAUD ternyata pengelola yang berijazah S1+ sangat kecil karena hanya seperlima dari nilai yang ada.

## B. Saran

Seperti halnya dalam simpulan maka saran juga dirinci menjadi empat materi, yaitu potensi SDM PAUD dan PNF, kebutuhan, SDM PAUD dan PNF, indikator SDM PAUD dan PNF, dan kinerja SDM PAUD dan PNF.

1. Dengan melihat potensi SDM PAUD dan PNF maka terlihat bahwa pendidik pada pendidikan keaksaraan dan paket A setara SD hanya 1, oleh karena itu perlu ditingkatkan kuantitas pendidik pada dua program PNF tersebut. Selain itu, perlu dikaji ulang statistik PNF, khususnya statistik pendidikan keaksaraan dan statistik pendidikan kesetaraan, apakah memang benar pengelola juga menjadi pendidik karena kondisi tersebut di tingkat nasional bukan pada tingkat yang lebih rendah atau kecamatan.
2. Oleh karena kebutuhan pendidik lebih kecil daripada pendidikan yang ada maka dalam rangka mengisi kekurangan SDM PAUD dan PNF perlu ditingkatkan pendidik pada program pendidikan keaksaraan dan kursus dengan menambah kuantitas pendidik sehingga memenuhi standar yang telah ditentukan. Namun, penambahan pendidik pada kursus akan sangat

besar jika dibandingkan pada penambahan pendidik pendidikan keaksaraan.

3. Dalam indikator SDM maka kualitas pendidik dan pengelola yang belum S1 supaya ditingkatkan karena di semua program pendidik dan pengelola yang S1 dan lebih tinggi kurang dari 50% kecuali paket B setara SMP dan paket C setara SMA. Peningkatan ini supaya diprioritaskan pada pendidikan keaksaraan dan PAUD karena nilainya kurang dari 25% melalui penyetaraan pendidik dan pengelola yang dapat dilakukan secara swadana atau pun dilakukan oleh pemerintah.
4. Kinerja SDM PAUD dan PNF termasuk kategori pratama karena dari 8 indikator yang digunakan lima indikator, yaitu pendidik S1, pendidik menurut pekerjaan, pendidik menurut jenis kelamin, pengelola S1, dan pengelola menurut jenis kelamin dalam kategori madya. Selain itu, bila dilihat dari 7 program PNF maka dua program, yaitu PAUD dan TK termasuk kategori kurang. Oleh karena itu, disarankan agar PAUD dan TK ditingkatkan kualitas SDMnya terutama melalui penyetaraan pendidik dan pengelola menjadi S1.
5. Bila saran untuk ketiga jenis materi yang dibahas di atas dapat dipenuhi maka kinerja SDM PAUD dan PNF pasti akan meningkat. Selain itu, diperlukan juga analisis serupa untuk tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungannya mana yang sebetulnya menjadi masalah dalam SDM PAUD dan PNF. +
6. Selain itu, agar diperoleh kinerja SDM PAUD dan PNF yang sesuai dengan kondisi program PAUD dan PNF yang sebenarnya maka pada tahun-tahun mendatang supaya diusahakan data program PNF dengan variabel yang sama. Dengan kata lain, Statistik PAUD dan Statistik PNF yang dihasilkan supaya memiliki variabel yang sama sehingga bisa dilakukan analisis yang sama.

## PUSTAKA ACUAN

- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta.
- <http://humancapitaljournal.com/pengertian-sumber-daya-manusia/> diakses tanggal 18 Juni 2016
- <http://kamus.bahasaindonesia.org/analisis/> diakses tanggal 18 Juni 2016
- <http://kamus.bahasaindonesia.org/kinerja/> diakses tanggal 25 Juni 2016
- <http://kamus.bahasaindonesia.org/konversi/> diakses tanggal 25 Juni 2016
- <http://kamus.bahasaindonesia.org/standar/> diakses tanggal 18 Juni 2016
- [http://kamus.bahasaindonesia.org/sumber daya manusia/](http://kamus.bahasaindonesia.org/sumber%20daya%20manusia/) diakses tanggal 18 Juni 2016.
- <http://kbbi.web.id/nonformal/> diakses tanggal 18 Juni 2015.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan\\_nonformal/](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_nonformal/) diakses tanggal 25 Juni 2016.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, Permendikbud Nomor 11, Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Kintamani, Ida, 2007, Analisis Data Pendidikan, disajikan sebagai bahan pelatihan regional. Pusat Statistik Pendidikan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2013a, *Statistik PAUD 2013*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2013b, *Statistik Pendidikan Nonformal 2013*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2014, *Analisis Sumber Daya Manusia Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2012/2013*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sekretariat Negara, 2005, Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta.
- [Wikipedia.org/wiki/kinerja](http://Wikipedia.org/wiki/kinerja) diakses pada tanggal 18 Juni 2016
- [Wikipedia.org/wiki/standar](http://Wikipedia.org/wiki/standar) diakses pada tanggal 25 Juni 2016
- [Wikipedia.org/wiki/sumber\\_daya\\_manusia](http://Wikipedia.org/wiki/sumber_daya_manusia) diakses pada tanggal 18 Juni 2016